

4

Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*

“ASSA menyadari bahwa penerapan GCG secara konsisten kian penting di tengah persaingan global yang kian terbuka.”

“ASSA realizes that consistent implementation of GCG is increasingly important in the middle of highly open global competition.”





1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
10	J
11	K
12	L
13	M
14	N
15	O
16	P
17	Q
18	R
19	S
20	T

Median Score
= 80.000

Range
Mean
Median
SD

Range of Median

100% of SD

3



Landasan Penerapan GCG

Guideline of GCG Implementation



Guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan demi mendukung Visi Perusahaan sebagai penyedia jasa transportasi dan logistik terintegrasi yang terbaik, ASSA menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam hal ini, Perseroan telah melaksanakan *roadmap* penerapan GCG secara bertahap, mulai dari fase *Compliance*, *Conformance*, *Performance*, hingga fase *Sustainable*. Semua itu dilakukan untuk mendukung pembangunan lingkungan bisnis yang sehat bagi seluruh pemangku kepentingan.

ASSA menyadari bahwa penerapan GCG secara konsisten kian penting di tengah persaingan global yang kian terbuka. Dalam penerapan tata kelola, Perseroan berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Transparency (Transparansi)

ASSA menjunjung tinggi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Dalam proses pengambilan keputusan, manajemen ASSA terikat pada mekanisme sebagaimana diatur dalam *Code Of Conduct* Perseroan, dan dalam mengungkapkan informasi material ASSA menyampaikannya melalui *Corporate Secretary*.

In order to implement Good Corporate Governance and support Company's vision as the best integrated transportation and logistic service providers, ASSA implements principles of Good Corporate Governance. In this regards, the Company has conducted roadmap of GCG implementation gradually, starting from phase of Compliance, Conformance, Performance, until Sustainable. It was all done to support the development of healthy business environment for all stakeholders.

ASSA realizes that consistent implementation of GCG is increasingly important in the middle of highly open global competition. The Company's GCG is implemented based on the following principles:

1. Transparency

ASSA upholds transparency in implementing process of decision-making and disclosure of material and relevant information regarding the Company. In the decision-making process, ASSA management is tied to the mechanism as stated in Code of Conduct of the Company, and in disclosing material information, ASSA delivers it through the Corporate Secretary.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ASSA memiliki sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, antara lain, pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Anggaran Tahunan (RAT), penyampaian laporan keuangan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan Auditor Eksternal, serta pemberlakuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), Pedoman Konflik Kepentingan, serta Pedoman Penerimaan Hadiyah/Cinderamata dan Hiburan (Gratifikasi).

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, ASSA memiliki sistem pengelolaan Perseroan yang menitikberatkan pada kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap personel, sehingga masing-masing insan ASSA dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif. Setiap karyawan diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap aturan internal maupun aturan perundangan. Perusahaan juga memperhatikan *reward and consequences* terhadap aktivitas karyawan.

4. Independency (Independensi)

ASSA memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan secara independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan)

ASSA menerapkan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah masyarakat umum, pemerintah, investor, pekerja serta pemangku kepentingan lainnya. ASSA memperhatikan hak dan kewajiban karyawannya secara adil dan wajar sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Accountability

In conducting its business, ASSA has the management system that supports the clarity of functions, implementation and accountability of Company's organ, thus the management of the Company is conducted effectively. Steps conducted to implement the accountability principle among others are the report of Board of Directors to Board of Commissioners regarding Annual Budget Plan, delivery of financial statements in the Annual General Meeting (AGM), establishment of Internal Audit and appointment of External Auditor, implementation of Business Ethics and Code of Conduct, Conflict of Interest guideline as well as guideline of receiving gifts/souvenirs and gratification.

3. Responsibility

In conducting its business, ASSA has the Company's management system that emphasizes on clarity of duties and responsibilities of each personnel, thus every personnel of ASSA can conduct their responsibilities effectively. Every employee should comply to the internal and regulation provisions. The Company also concerns about rewards and consequences of employees' activities.

4. Independency

ASSA ensures that business management is conducted independently without conflict of interests and influence/pressure from any parties that are not in accordance with the regulations and healthy Company's principles

5. Fairness

ASSA implements fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders based on agreement and regulations, in this case the public, government, investors, employees as well as other stakeholders. ASSA concerns about rights and obligations of its employees fairly in accordance with the Company's regulations and applicable Manpower regulations

Tujuan Implementasi GCG

Objectives of GCG Implementation

Implementasi GCG bagi ASSA bertujuan untuk lebih meningkatkan strategi bisnis ke arah yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan cara itu, maka ASSA akan mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat dan dunia usaha. Tujuan implementasi GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip GCG agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Perseroan.
3. Mendorong agar Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
4. Meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif dalam dunia investasi nasional.

GCG implementation of ASSA aims to further improve its business strategy in accordance with GCG principles. In this way, ASSA will receive trust and acknowledgement from the public and business world.

Objectives of Company's GCG implementation are as follows:

1. Optimizing Company's values by improving GCG principles in order for the Company to have strong competitiveness.
2. Supporting Company's management professionally, transparently and efficiently, as well as empowering functions and increasing Company's independency.
3. Supporting the Company in making decisions and conducting its business to be always based on high moral values and compliance to applicable regulations, as well as Company's Social Responsibility awareness to stakeholders and environmental preservation surrounding the Company
4. Increase contribution to the national economy.
5. Improving conducive condition in the national investment world.

Roadmap Penerapan GCG

Roadmap of GCG Implementation

Dengan adanya program transformasi di semua bidang, ASSA membuat *roadmap* penerapan GCG secara bertahap, dimulai dengan melaksanakan program kepatuhan (*compliance*) dan diharapkan bisa mencapai tahap *sustainability*.

With the transformation program in all sectors, ASSA creates roadmap for GCG Implementation ASSA gradually creates a roadmap for, starting from conducting compliance program and it is expected to achieve the sustainability phase.



Fase Penerapan GCG ASSA

Phase of ASSA GCG Implementation

1. **Compliance**, penerapan GCG didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. **Conformance**, penerapan GCG menjadi bagian dari etika dengan adanya pengendalian internal manajemen risiko yang efektif.
3. **Performance**, penerapan GCG sudah menjadi bagian dari kinerja perusahaan yang profesional.
4. **Sustainability**, peningkatan penerapan GCG di setiap tahapan fase berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

1. **Compliance**, GCG implementation is based on compliance to the regulations.
2. **Conformance**, GCG implementation becomes a part of code of conduct with the effective risk management internal control.
3. **Performance**, GCG implementation has become a part of professional Company's performance.
4. **Sustainability**, improvement of GCG implementation in every sustainability phase in the following years.

Self Assesment GCG ASSA

Self Assessment of ASSA GCG

Dalam usaha meningkatkan kinerja Perseroan, kepatuhan pada perundang-undangan dan budaya kerja, Perseroan senantiasa berupaya melakukan berbagai perbaikan guna mewujudkan pencapaian skor GCG yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, ASSA belum melakukan *self assesment* GCG dan akan kembali melakukannya pada tahun 2017. *Self assessment* terakhir pada 2014 dengan skor 77,03, yang menunjukkan bahwa ASSA termasuk dalam predikat "Perusahaan Terpercaya". Selama ini, skor GCG ditetapkan sebagai salah satu parameter tingkat kesehatan Perseroan.

Skor Self Assessment GCG ASSA

In its effort to improve performance, compliance to the regulations as well as working culture, the Company always tries to conduct several improvements to realize GCG score achievement that always increases from year to year. In 2016 ASSA has not performed GCG self-assessment and will do it again in 2017. The last self-assessment was in 2014 with a score of 77.10, indicating ASSA was included in the predicate of "Trusted Company". GCG score is determined as one of the parameters of Company's healthy level.

Self Assessment Score of ASSA GCG

No. No.	Indikator Indicator	2014	
		Pencapaian Achievement %	
1. <i>Self Assessment</i> <i>Self Assessment</i>			22.07
2. <i>Dokumen</i> <i>Document</i>			31.48
3. <i>Makalah</i> <i>Papers</i>			9.68
4. <i>Observasi</i> <i>Observation</i>			13.80
Total			77.03

Sosialisasi dan Implementasi GCG

GCG Socialization and Implementation

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh karyawan maupun pemangku kepentingan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan, ASSA melaksanakan program sosialisasi GCG kepada karyawannya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, serta Anak Perusahaan.

To improve knowledge and awareness of all employees and stakeholders in implementing GCG principles in the Company, ASSA conducts GCG socialization programs to all employees. This socialization activity is conducted in Head Office and Branch Offices, as well as Subsidiaries.

Struktur dan Mekanisme Hubungan Tata Kelola Perusahaan

Structure and Mechanism of Corporate Governance

Struktur Tata Kelola ASSA terbagi menjadi Organ Utama, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung terdiri atas Komite-komite, *Corporate Secretary*, Internal Audit, Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris. Struktur Tata Kelola selengkapnya disajikan dalam bagan sebagai berikut:

ASSA Governance Structure is divided into Main Organs, namely the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. While Supporting Organ consists of the Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Audit Committee and Secretary of Board of Commissioners. Complete Governance Structure is presented in the following chart:

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Wewenang tersebut antara lain:

1. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar;
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Anggota Direksi;
4. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.

Perseroan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan kepada RUPS. RUPS diselenggarakan guna memberikan manfaat yang optimal, serta semua keputusan yang diambil pada RUPS merupakan keputusan yang matang dan didasarkan pada pertimbangan yang cermat. Oleh karena itu, Perseroan wajib menyediakan dan menyampaikan seluruh informasi dan penjelasan terkait dengan agenda RUPS, seperti jalannya kegiatan usaha, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan RUPS, ASSA telah melakukannya sesuai prosedur dan peraturan pasar modal yang berlaku.

Pada tahun 2016, ASSA telah mengadakan RUPS dan RUPSLB untuk tahun buku 2015 pada 6 Juni 2016 bertempat di Sampoerna Strategic Square-Jakarta. Rapat dilakukan setelah melalui proses pemanggilan pada tanggal 13 Mei 2016 melalui surat kabar sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

RUPS Tahunan

General Meeting of Shareholders is the Company Organ that has authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners in the limitation determined in Law or Article of Association. The authorities among others are as follows:

1. Accountability of Board of Commissioners and Board of Directors related to Company's management.
2. Change of Article of Association.
3. Appointment and Dismissal of Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Distribution of duties and authorities of management among Directors and others.

The Company guarantees to provide all information related to the Company to GMS. GMS is held to provide optimum benefits, and all decisions made in GMS are mature decisions and based on careful consideration. Therefore the Company should provide and deliver all information and explanations related to GMS agenda, such as business activities, as long as they are not in contrast with Company's interest and applicable regulations. ASSA has conducted the GMS in accordance with the applicable procedures and regulations of capital market.

In 2016, ASSA held AGM and EGM for 2015 fiscal year on June 6, 2016 which took place in Sampoerna Strategic Square, Jakarta. The Meeting was held after invitation process on May 13, 2016 via newspapers in accordance with article 21 paragraph 2 of the Company's Articles of Association with the following decisions:

Annual General Meeting

No. No.	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision
1	Agenda 1	<p>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.</p> <p><i>Approved and validated Company's Annual Report for 2015 fiscal year, including Company's Activity report, Board of Commissioners' Supervision Function Report and 2015 Financial Statements Report, as well as giving full discharge and release of responsibilities (acquit et de charge) to Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management actions in 2015 fiscal year as long as those actions were reflected in the Annual Report.</i></p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No. No.	Agenda Agenda	Hasil Keputusan <i>Decision</i>
No. No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
2	Agenda 2	1. Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2015, sebesar Rp 34.145.839.640 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah), sebagai berikut: a. Sebesar Rp 13.590.000.000 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau Rp. 4,- (empat Rupiah) per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, dengan tata cara sebagai berikut: 1. <i>Approved the use of Company's net income attributable to 2015 owners of parent Company amounted to Rp34,145,839,640,- (thirty four billion one hundred forty five million, eight hundred thirty nine thousand six hundred and forty Rupiah), as follows:</i> a. <i>Rp 13.590.000.000 (thirteen billion, five hundred and ninety million Rupiah) or Rp. 4, - (four Rupiah) per share, was distributed as cash dividend to the shareholders of the Company, with the following procedure:</i>
		1 Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular & Negotiation Market</i>
		2 Ex . Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi <i>Ex. Dividend in Regular & Negotiation Market</i>
		3 Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>
		4 Ex. Dividen di Pasar Tunai <i>Ex. Dividend in Cash Market</i>
		5 Recording Date Dividen <i>Recording Dividend Date</i>
		6 Pembayaran Dividen <i>Dividend Payment</i>

II.Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.00. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya, Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2016 pukul 14.00 WIB.
5. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah d ilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No.	Agenda	Hasil Keputusan Decision
		<ul style="list-style-type: none"> i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE; ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI; iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 16 Juni 2016 pukul 14.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.
		<p>II. <i>Dividend payment provisions are as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Shareholders who are entitled to the payment of dividends are shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders on June 16, 2016 at 14:00. Dividend payments are made through bank transfer.</i> 2. <i>For shareholders whose shares are kept in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payments of cash dividends will be distributed by KSEI through Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders opened securities account. Furthermore, shareholders will receive information regarding Cash Dividend payments from securities company and/or custodian bank where the shareholders opened securities account. As for shareholders whose shares are not kept in Collective Custody of KSEI, Cash Dividend payments will be transferred directly to the bank account of Shareholders concerned.</i> 3. <i>Dividends to be paid are subject to tax in accordance with applicable tax law in Indonesia.</i> 4. <i>Shareholders who are domestic taxpayers who have not provided Taxpayer Identification Numbers ("TIN"), were asked to submit the TIN to KSEI or BAE no later than June 16, 2016 at 14:00.</i> 5. <i>Shareholders who are Foreign Taxpayers whose countries have the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia and who demand adjusted taxes with the provision, are requested to send/submit original Certificate of Domicile (or "SKD") issued by the competent authority in the country or copies that have been certified by Tax Office in Indonesia if the SKD is used for several companies in Indonesia, as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> i. <i>Shareholders who are still holding the shares scripts, the original SKD is sent to the BAE;</i> ii. <i>For Shareholders without scripts, the original SKD is sent through KSEI account holder in accordance with KSEI provision;</i> iii. <i>Original SKD must be received no later than June 16, 2016 at 14:00. If until the deadline specified SKD has not been received, then the dividend paid will be subject to withholding tax of 20%.</i> b. <i>Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;</i> c. <i>Sebesar Rp 19.555.839.640 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.</i>
3	Agenda 3:	<p>Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.</p> <p>Authorized the Board of Directors to appoint Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's 2016 financial statements and determine the fees and terms of appointment.</p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No.	Agenda	Hasil Keputusan Decision																																														
		<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima pengunduran diri Bapak Hadi Kasim sebagai Presiden Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas kinerjanya dalam Perseroan. b. Mengangkat Ibu Erida sebagai Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Accepted resignation of Mr. Hadi Kasim as President Commissioner and thanked him for his performance in the Company. b. Appointed Mrs. Erida as President Commissioner of the Company as of the close of the Meeting, so that the structure of the Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of Meeting until the conclusion of Company's Annual General Meeting in 2017, is the following composition: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dewan Komisaris</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Presiden Komisaris</td> <td>: Ibu Erida</td> </tr> <tr> <td>• Komisaris</td> <td>: Bapak Rudyanto Hardjanto</td> </tr> <tr> <td>• Komisaris Independen</td> <td>: Thomas Honggo Setjokusumo</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Direksi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Presiden Direktur</td> <td>: Bapak Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati</td> </tr> <tr> <td>• Direktur</td> <td>: Bapak Hindra Tanujaya</td> </tr> <tr> <td>• Direktur</td> <td>: Bapak Maickel Tilon</td> </tr> <tr> <td>• Direktur</td> <td>: Bapak Jany Candra</td> </tr> <tr> <td>• Direktur (Independen)</td> <td>: Bapak Alexander Sukanta</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td><i>Board of Commissioners</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• <i>Prsident Commissioner</i></td> <td>: <i>Mrs. Erida</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Commissioner</i></td> <td>: <i>Mr. Rudyanto Hardjanto</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Independent Commissioner</i></td> <td>: <i>Mr. Thomas Honggo Setjokusumo</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td><i>Board of Directors:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• <i>President Director</i></td> <td>: <i>Mr. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Director</i></td> <td>: <i>Mr. Hindra Tanujaya</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Director</i></td> <td>: <i>Mr. Maickel Tilon</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Director</i></td> <td>: <i>Mr. Jany Candra</i></td> </tr> <tr> <td>• <i>Director (Independent)</i></td> <td>: <i>Mr. Alexander Sukanta</i></td> </tr> </table> 	Dewan Komisaris		• Presiden Komisaris	: Ibu Erida	• Komisaris	: Bapak Rudyanto Hardjanto	• Komisaris Independen	: Thomas Honggo Setjokusumo	 		Direksi :		• Presiden Direktur	: Bapak Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	• Direktur	: Bapak Hindra Tanujaya	• Direktur	: Bapak Maickel Tilon	• Direktur	: Bapak Jany Candra	• Direktur (Independen)	: Bapak Alexander Sukanta	 		<i>Board of Commissioners</i>		• <i>Prsident Commissioner</i>	: <i>Mrs. Erida</i>	• <i>Commissioner</i>	: <i>Mr. Rudyanto Hardjanto</i>	• <i>Independent Commissioner</i>	: <i>Mr. Thomas Honggo Setjokusumo</i>	 		<i>Board of Directors:</i>		• <i>President Director</i>	: <i>Mr. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati</i>	• <i>Director</i>	: <i>Mr. Hindra Tanujaya</i>	• <i>Director</i>	: <i>Mr. Maickel Tilon</i>	• <i>Director</i>	: <i>Mr. Jany Candra</i>	• <i>Director (Independent)</i>	: <i>Mr. Alexander Sukanta</i>
Dewan Komisaris																																																
• Presiden Komisaris	: Ibu Erida																																															
• Komisaris	: Bapak Rudyanto Hardjanto																																															
• Komisaris Independen	: Thomas Honggo Setjokusumo																																															
Direksi :																																																
• Presiden Direktur	: Bapak Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati																																															
• Direktur	: Bapak Hindra Tanujaya																																															
• Direktur	: Bapak Maickel Tilon																																															
• Direktur	: Bapak Jany Candra																																															
• Direktur (Independen)	: Bapak Alexander Sukanta																																															
<i>Board of Commissioners</i>																																																
• <i>Prsident Commissioner</i>	: <i>Mrs. Erida</i>																																															
• <i>Commissioner</i>	: <i>Mr. Rudyanto Hardjanto</i>																																															
• <i>Independent Commissioner</i>	: <i>Mr. Thomas Honggo Setjokusumo</i>																																															
<i>Board of Directors:</i>																																																
• <i>President Director</i>	: <i>Mr. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati</i>																																															
• <i>Director</i>	: <i>Mr. Hindra Tanujaya</i>																																															
• <i>Director</i>	: <i>Mr. Maickel Tilon</i>																																															
• <i>Director</i>	: <i>Mr. Jany Candra</i>																																															
• <i>Director (Independent)</i>	: <i>Mr. Alexander Sukanta</i>																																															
4	Agenda 4:	<p>c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangi segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>c. Approved to give authority and power with right of substitution to the Board of Directors to perform any actions with respect to changes in the composition abovementioned Board members, including but not limited to making or requesting to be made and signing any deeds made before the Notary, and notifying the competent authorities and performing any and all actions required in connection with the decision in accordance with applicable legislation, one way or another without any exceptions.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. <p>a. Authorized the Nomination and Remuneration Committee, to determine the salaries, fees, bonuses and/or other allowances for members of Company's Board of Commissioners for 2016 fiscal year.</p> <p>b. Gave authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for members of Board of Directors.</p>																																														
5	Agenda 5																																															

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPSLB:

Extraordinary General Meeting of Shareholders/EGMS

No. No.	Hasil Keputusan Decision
1	Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan, dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjama di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. <i>Approved the guarantee of most or all Company assets including but not limited to building land, vehicles, and accounts receivable to get loan facilities from Financial Institutions as well as additions of future loans to the Company and all of the Company's business units with the guarantee value and other provisions considered favourable by the Board of Directors.</i>
2	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. <i>Gave authority and power to the Board of Directors, with the right to transfer this power to others, to perform any and all actions required in connection with the above mentioned decision.</i>

Realisasi Hasil Keputusan RUPS tahun 2015

Sepanjang tahun 2016 manajemen Perseroan telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keputusan RUPS tahun 2015.

Sementara itu, untuk tahun 2015, ASSA telah mengadakan RUPS dan RUPSLB untuk tahun buku 2014 pada 8 Juni 2015 bertempat di Hotel Santika, Kelapa Gading, Jakarta. Rapat dilakukan setelah melalui proses pemanggilan pada tanggal 18 Mei 2015 melalui surat kabar sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dengan keputusan sebagai berikut:

RUPSTahunan:

Realization of 2015 GMS Decision

Throughout 2016, Company's management has conducted its duties and responsibilities based on 2015 GMS decisions.

Meanwhile, in 2015, ASSA held AGM and EGM for 2014 fiscal year on June 8, 2015 at the Santika Hotel Kelapa Gading, Jakarta. The Meeting was held after the invitation process on 18 May 2015 via newspapers in accordance with article 21 paragraph 2 of the Articles of Association with the following decisions:

AGM:

No. No.	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision
1	Agenda 1	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014, serta memberikan penulisan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. <i>Approved and validated Company's Annual Report for 2014 fiscal year, including Company's Activity report, Board of Commissioners' Supervision Function Report and 2014 Financial Statements Report, as well as giving full discharge and release of responsibilities (<i>acquit et de charge</i>) to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management actions in 2014 fiscal year as long as those actions were reflected in the Annual Report.</i>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No. No.	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision
No. No.	Kegiatan Activity	Tanggal Date
2 Agenda 2	1 Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi <i>Cum Dividend in Regular & Negotiation Market</i>	June 15, 2015
	2 Ex . Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi <i>Ex. Dividends in Regular & Negotiation Market</i>	June 16, 2015
	3 Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend in Cash Market</i>	June 18, 2015
	4 Ex. Dividen di Pasar Tunai <i>Ex. Dividends in Cash Market</i>	June 19, 2015
	5 Recording Date Dividen <i>Recording Dividend Date</i>	June 18, 2015
	6 Pembayaran Dividen <i>Dividend Payment</i>	July 9th, 2015

II.Ketentuan tentang pembayaran Dividen adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran Dividen adalah Pemegang Saham yang namanya tercantat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00. pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer bank.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian Dividen Tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran Dividen Tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer langsung ke rekening bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dividen yang akan dibayarkan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No.	Agenda	Hasil Keputusan Decision
5.	<p>Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/ menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE; ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI; iii. Asli SKD tersebut, harus diterima selambat-lambatnya 18 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan SKD belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%. <p>II. Dividend payment provisions are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholders who are entitled to the payment of dividends are shareholders whose names are listed in the Register of Shareholders on June 18, 2015 at 16:00. Dividend payments are made through bank transfer 2. For shareholders whose shares are kept in Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), payments of cash dividends will be distributed by KSEI through Securities Company and / or Custodian Bank where the shareholders opened securities account. Furthermore, shareholders will receive information regarding Cash Dividend payments from securities company and/or custodian bank where the shareholders opened securities account. As for shareholders whose shares are not kept in Collective Custody of KSEI, Cash Dividend payments will be transferred directly to the bank account of Shareholders concerned. 3. Dividends to be paid are subject to tax in accordance with applicable tax law in Indonesia. 4. Shareholders who are domestic taxpayers who have not provided Taxpayer Identification Numbers ("TIN"), were asked to submit the TIN to KSEI or BAE no later than June 18, 2015 at 16:00. 5. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose countries having Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Republic of Indonesia and who demand adjusted taxes with the provision, are requested to send / submit original Certificate of Domicile (or "SKD") issued by the competent authority in the country or its copies that have been certified by Tax Office in Indonesia if the SKD is used for several companies in Indonesia, as follows: <ul style="list-style-type: none"> i. Shareholders who are still holding the shares scripts, the original SKD is sent to BAE; ii. For Shareholders without scripts, the original SKD is sent through KSEI account holder in accordance with KSEI provision; iii. Original SKD must be received no later than June 18, 2015 at 16:00. If until the deadline specified SKD has not been received, then the dividend paid will be subject to withholding tax of 20%. b. Sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; c. Sebesar Rp 24.960.275.554.- (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. b. Rp. 1,000,000,000.- (one billion Rupiah) was allocated and recorded as reserve fund; c. Rp 24,960,275,554.- (twenty four billion nine hundred and sixty million two hundred seventy five thousand five hundred and fifty-four Rupiah), was incorporated and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital. 	Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

3 Agenda 3:

Authorized the Board of Directors to appoint Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's 2015 financial statements and determine the fees and terms of appointment.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

No. No.	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision
4	Agenda 4:	<p>a. Menerima pengunduran diri Ibu Rallyati Arianto Wibowo sebagai Direktur Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam bukubuku atau catatan-catatan Perseroan.</p> <p>a. Accepted resignation from Mrs. Rallyati Arianto Wibowo as Independent Director of the Company with thanks for her services and gave full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) for management actions done during her terms of office as long as those actions were reflected in the books or records of the Company.</p> <p>b. Mengangkat Bapak Alexander Sukanta sebagai Direktur Independent Perseroan, dan selanjutnya menetapkan dan mengesahkan susunan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :</p> <p>Direksi :</p> <p>Presiden Direktur : Bapak Prodjo Sunarjanto Direktur : Bapak Hindra Tanujaya Direktur : Bapak Maickel Tilon Direktur : Bapak Jany Candra Direktur Independen : Bapak Alexander Sukanta</p> <p>b. Appointed Mr. Alexander Sukanta as Independent Director of the Company and determined and validated the composition of Board of Directors as of the closing of Meeting until the end of tenure of Board of Directors, at the closing of Company's Annual General Meeting which will be held in 2017, as follows:</p> <p>Board of Directors:</p> <p>President Director : Mr. Prodjo Sunarjanto Director : Mr. Hindra Tanujaya Director : Mr. Maickel Tilon Director : Mr. Jany Candra Independent Director : Mr. Alexander Sukanta</p> <p>c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p>c. Approved to give authority and power with right of substitution to the Board of Directors to perform any actions with respect to changes in the composition abovementioned Board members, including but not limited to making or requesting to be made and signing any deeds made before the Notary, and notifying the competent authorities and performing any and all actions required in connection with the decision in accordance with applicable legislation, one way or another without any exceptions.</p>
5	Agenda 5	<p>a. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.</p> <p>a. Authorized the Nomination and Remuneration Committee, to determine the salaries, fees, bonuses and/or other allowances for members of Company's Board of Commissioners for 2015 fiscal year.</p> <p>b. Gave authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and /or allowances for members of Board of Directors.</p>

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPSLB

EGM

No. No.	Hasil Keputusan Decision
1	Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat. <i>Approved changes to the Articles of Association to comply with the Regulation of the Financial Services Authority, as outlined in the Meeting.</i>
2	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menugangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Agreed to give the authority and power to the Board of Directors, with right of substitution, to perform any and all actions required in connection with the decision, including but not limited to stating/ describing the decision in the deeds made before a Notary, changing and/or rearranging entire Articles of Association in accordance with the decision (including composition of shareholders in the deed if necessary), as required by and in accordance with the provisions of applicable regulation, making or asking to be made and signing the deeds and letters or documents required, and subsequently applying for approval and / or delivering decision of this Meeting and/or changes in the Articles of Association to competent authorities, and taking all and any measures necessary in accordance with applicable regulation.</i>
3	Menyetujui atas penjaminan sebagian besar atau seluruh asset Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, maupun dalam rangka penerbitan dan penawaran umum obligasi di Pasar Modal dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan. <i>Approved the guarantee of most or all Company assets to get loan facilities from the Bank or other Financial Institutions as well as the issuance and public offering of bonds in the capital market with the guarantee value and provisions considered favourable by the Board of Directors.</i>
4	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. <i>Gave authority and power to the Board of Directors, with the right to transfer this power to others, to perform any and all actions required in connection with the above mentioned decision.</i>

Realisasi Hasil Keputusan RUPS tahun 2015 Realization of 2015 GMS Decision

Sepanjang tahun 2015 manajemen Perseroan telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan keputusan RUPS tahun 2014.

Throughout 2015, Company's management has conducted its duties and responsibilities based on 2014 GMS decisions.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan.

Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 6 Juni 2016 Perseroan menetapkan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut

Nama Name	Jabatan Position
Hadi Kasim *)	Presiden Komisaris President Commissioner
Erida **)	Presiden Komisaris President Commissioner
Rudyanto Hardjanto	Komisaris Commissioner
Thomas Honggo Setjokusumo	Komisaris Independen Commissioner Independent

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Manual)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perseroan, mempersyaratkan adanya suatu ketentuan yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris, maka Perseroan membuat pola hubungan kerja antar Direksi dengan Dewan Komisaris, yang disebut dengan *Board Manual*.

Tujuan *Board Manual* adalah menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan bisnis Perseroan. Dengan adanya *Board Manual* ini, maka Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanat tugas Perseroan dengan sungguh-sungguh, berdedikasi tinggi dan penuh tanggungjawab berlandaskan prinsip-prinsip tatakelola Perseroan yang baik dan benar.

Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of supervision in general and/or special in accordance with the article of association as well as giving advice to the Board of Directors. Board of Commissioners can also provide advice and recommendations to the Board of Directors in connection with its supervisory and advisory functions.

Composition of Board of Commissioners

Based on GMS decision on June 6, 2016, the Company determined composition of Board of Commissioners as follows

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Working Guidelines of Board of Commissioners (Board Manual)

Implementation of Good Corporate Governance in the Company requires provisions regulating effective working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, thus the Company creates working relationship patterns between the Board of Directors and the Board Commissioners, called the Board Manual.

Board Manual aims to explain standard pattern of work relationship between Board of Directors and Board of Commissioners in performing duties so as to realize company management that is professional, transparent, effective and efficient in upholding integrity and honesty in running business. With the Board Manual, BOD and BOC are highly committed to carrying out the mandate with dedication and responsibility based on GCG principles.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam kaitannya dengan fungsi Dewan Komisaris, *Board Manual* secara rinci mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Fungsi dewan Komisaris
- b. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan Dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- f. Wewenang Dewan Komisaris
- g. Hak Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris
- i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- j. Organ Pendukung
- k. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Organ Pendukung
- l. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas, tanggung Jawab dan kewajiban sebagai berikut:

1. Komisaris bertugas dalam:
 - a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap efektivitas penerapan GCG.
 - e. Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisaris bertanggungjawab atas hal-hal berikut:
 - a. Menyusun pembagian tugas di antara anggota Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Komisaris.
 - b. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme review terhadap kinerja Dewan Komisaris.

In relation to the function of Board of Commissioners, *Board Manual* arranges the following matters:

- a. Functions of Board of Commissioners
- b. Qualifications and Compositions, Membership and Tenure of Board of Commissioners
- c. Introduction and Capability Building Program
- d. Position Ethics of Board of Commissioners
- e. Duties and Responsibilities of Board of Commissioners
- f. Authority of Board of Commissioners
- g. Rights of Board of Commissioners
- h. Meetings of Board of Commissioners
- i. Performance Evaluation of Board of Commissioners
- j. Supporting Organs
- k. Working Relationship Between Board of Commissioners with Supporting Bodies
- l. Working Relationship Between Board of Commissioners and Board of Directors

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners has duties, responsibilities and obligations as follows:

1. Commissioner's duties are:
 - a. Supervising and giving advices to the Board of Directors in conducting business activities
 - b. Monitor and evaluate Board of Directors' performance.
 - c. Supervise risk management implementation
 - d. Supervise effectiveness of GCG implementation.
 - e. Monitor Company's compliance to the applicable regulations
2. Commissioners are responsible for the following:
 - a. Arrange the division of duties among members of Board of Commissioners in accordance with their expertise and experience
 - b. Arrange working program and performance targets of the Board Commissioner every year as well as the review mechanism of Board of Commissioners' performance

- c. Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Komisaris kepada *stakeholder*
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.

- 3. Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan visi dan misi Perseroan.
 - b. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Di samping tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Berhak memperoleh akses mengenai Perseroan dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Perseroan dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Perseroan.
- c. Berhak membentuk Komite-Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan mendapat persetujuan Pemegang saham, kecuali Komite Audit.
- d. Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham.
- e. Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Komisaris.

Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Presiden Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- c. Arrange mechanism of information delivery from Commissioners to the stakeholders.
- d. Account for duties implementation of Board of Commissioners to GMS.

- 3. Commissioners have obligations to:
 - a. Provide opinions to GMS regarding strategic issues or considered important, including opinions regarding feasibility of vision and mission of the Companys
 - b. Analyze and examine periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors, including audits reports of Internal Control Unit.

Besides duties, responsibilities and obligations that should be conducted, Board of Commissioners has rights and authorities as follows:

- a. The right to obtain access regarding the Company and obtain information periodically, timely, and completely in accordance with the provision of the Articles of Association and applicable regulations.
- b. The right to ask the Board of Directors regarding Company's business activity management and ask Directors to attend Commissioner's meeting to obtain explanation regarding Company's condition.
- c. The right to establish Committees to assist its duties implementation with approval from shareholders, except Audit Committee
- d. The right to propose nominations of new Board of Directors to the shareholders
- e. The right to get professional help if necessary in conducting its duties
- f. The authority to make decisions in or outside of Commissioners' meeting

Remuneration Procedure of Board of Commissioners

Remuneration of the Board of Commissioners is determined by the GMS. President Commissioner provides recommendation to the Board of Commissioners regarding Board of Commissioners' remuneration to be disclosed to the GMS.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Perumusan sistem remunerasi Dewan Komisaris Perseroan didasari prinsip-prinsip:

1. Sesuai peraturan perundangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengevaluasi kebijakan remunerasi Dewan Komisaris bila ada perubahan yang bersifat normatif berdasarkan penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan setiap tahun dalam kegiatan RUPS Tahunan dan disesuaikan dengan keuangan Perseroan. Komponen Remunerasi untuk setiap Anggota Dewan Komisaris terdiri dari Gaji, Tunjangan, Fasilitas, dan Tantiem. Adapun penghasilan Dewan Komisaris berupa Honorarium, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Komunikasi, Fasilitas Asuransi Kesehatan, Santunan Purna Jabatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tantiem selama 1 (satu) tahun sebesar Rp585 juta.

FrekuenSI Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris ASSA telah melakukan pertemuan sebanyak 6 kali yang diadakan di kantor pusat sebagai berikut:

Tabel Kehadiran dan Agenda Rapat Dewan Komisaris 2016

Formulation of Board of Commissioners' remuneration system is based on several following principles:

1. Based on prevailing taxation and manpower regulations.
2. Transparency principle, internal balance and competitive with peer companies.

In its implementation, the Company evaluates Board of Commissioners remuneration policy and if there is any normative amendment based on assessment of Board of Commissioners' performance.

Remuneration of the Board of Commissioners is determined every year in Annual General Meeting and adjusted to Company's Finance. Remuneration components for each Members of the Board of Commissioners consists of salary, allowance, facilities, and bonus. Board of Commissioner's incomes are honorarium, transportation allowance, communications allowance, health insurance facilities, post-position compensation, religious holiday allowance and performance bonus for 1 (one) year amounted to Rp 585 million.

Frequency of Meetings and Attendance Level of Board of Commissioners

During 2016, the Board of Commissioners of ASSA held meetings 6 times at Head Office with agenda as follows;

Table of Attendance and 2016 Board of Commissioners' Meeting Agenda

Tanggal Date	Kehadiran Attendance			
	Hadi Kasim *)	Erida **)	Rudyanto Hardjanto	Thomas Honggo Setjokusumo
	Presiden Komisaris President Commissioner	Presiden Komisaris President Commissioner	Komisaris Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
February 16, 2016	1	-	1	1
April 25, 2016	1	-	-	1
June 14, 2016	1	-	-	1
August 2, 2016	-	1	-	1
October 31, 2016	-	1	-	1
December 6, 2016	-	1	1	1

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Tanggal Date	Kehadiran Attendance			
	Hadi Kasim *)	Erida **)	Rudyanto Hardjanto	Thomas Honggo Setjokusumo
	Presiden Komisaris President Commissioner	Presiden Komisaris President Commissioner	Komisaris Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner
Jumlah rapat Number of meetings	3	3	6	6
Jumlah kehadiran dan Persentase Total Attendance and Percentage	3 (100%)	3 (100%)	2 (33%)	6 (100%)

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dewan Komisaris dituntut untuk bisa bekerja sama dengan organ Perseroan yang lain. Sebab itu, ASSA memberikan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru. Program pengenalan bisa melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dan sebagainya. Tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan untuk anggota Komisaris baru ini berada di pundak Presiden Komisaris, atau jika Presiden Komisaris berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Presiden Komisaris.

Adapun program pengenalan untuk anggota Dewan Komisaris baru, antara lain, meliputi:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi Good Corporate Governance;
2. Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.

Orientation Program For New Commissioners

The Board of Commissioners are required to cooperate with the Company's other organs. Therefore, ASSA provides an orientation program for new members of the Board of Commissioners. The orientation program could be through presentations, meetings, visits to Company facilities, visit to Regional Offices and Branch Offices and so on. Responsibility for the program implementation for new members of Board of Commissioners rests with the President Commissioner, or if the President Commissioner is absent, then the responsibility for program implementation is on the President Director.

The orientation program for new members of the Board of Commissioners, among others, includes:

1. The principles and implementation of good corporate governance;
2. Description of the Company related to the objectives, nature, scope of activities, financial performance and operations, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the audit committee;
4. Description of the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors;
5. Various applicable laws and regulations, and corporate policies.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Secara berkala, Perseroan mengadakan program pengembangan diri bagi Dewan Komisaris dengan agenda dan materi sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Perseroan.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengasah kemampuannya dengan mengikuti beberapa seminar dan diskusi ilmiah serta pelatihan, baik di dalam dan luar negeri. Kegiatan-kegiatan yang diikuti tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Komisaris dan Perseroan.

Tabel pelatihan, *workshop*, seminar yang diikuti Dewan Komisaris selama 2016

No.	Seminar/Pelatihan <i>Training</i>	Penyelenggara Pelatihan <i>Training Operator</i>	Waktu & Tempat Pelaksanaan <i>Time & Place of Training</i>	Peserta <i>Participant</i>
1	Indonesia Economy Outlook	Triputra	September, 2016	Seluruh Jajaran Direksi <i>The entire Board of Directors</i>
2	Executive Committee	Triputra	September, 2016	Seluruh Jajaran Direksi <i>The entire Board of Directors</i>

Independensi Komisaris Independen

Dalam perundang-undangan di Indonesia hanya disebutkan kriteria independensi, seperti dalam Pasal 120 UU No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas itu, independensi komisaris independen tergantung pada ketiadaan afiliasi dengan pemegang saham utama perusahaan, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya.

Ketentuan independensi diperluas lagi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mencakup independensi di antaranya tak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi, dan pemegang saham utama serta tidak mempunyai hubungan

Periodically, the Company held a self-development program for the Board of Commissioners with the agenda and materials in accordance with the needs of Board of Commissioners and the Company.

Training and Capability Development of Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners always sharpen their competences by attending several seminars and scientific discussions as well as trainings, inside and outside of the country. The activities are tailored to the needs of Board of Commissioners and the Company.

Independency of Board of Commissioners

Indonesia's Law only states criteria of independency, for instance in Article 120 Law no. 40 of 2007. Based on the Limited Liability Company law, independency of Independent Commissioner depends on the absence of affiliation with Company's main shareholder, members of Board of Directors and other members of Board of Commissioners.

Independency provision is re-expanded in the Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company that includes independency, among others, do not have affiliation with the issuer or public company, members of board of commissioners and directors, and major shareholders and do not have business relationship and shares in the

usaha dan saham di emiten atau perusahaan publik tersebut. Independensi Komisaris ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Informasi Mengenai Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan Perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau Regulasi Bursa Efek Indonesia dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.5 dan Bursa Efek Indonesia No.IA Kep-305/BEJ/07-2004. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Merujuk pada Peraturan OJK tersebut di atas, kriteria atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Komisaris Independen adalah

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emitter atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emitter atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emitter atau Perusahaan Publik tersebut;
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emitter atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emitter atau Perusahaan Publik tersebut; dan

publicly listed companies. Commissioners Independence is determined in order to improve the surveillance performance conducted by Board of Commissioners and improve the application of good corporate governance principles.

Information Regarding Independent Commissioner

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have the financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/ or the controlling shareholders or with the Company that may hinder or inhibiting his/her position to act independently in accordance with the GCG principles.

Appointment of Independent Commissioners is regulated in the Regulation of the Financial Services Authority No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company or regulation of Indonesia Stock Exchange in Bapepam No.IX.I.5 and the Indonesia Stock Exchange No.IA Kep -305/BEJ/07-2004. Independent Commissioner is responsible for overseeing and also represents the interests of minority shareholders.

Referring to the FSA Regulations mentioned above, criteria or requirements that must be met by an Independent Commissioner are:

- Not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Issuer or Public Company within last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of Public Listed Company in subsequent periods;
- Does not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
- Does not have affiliation with the Public Company, member of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Issuer or the Public Company; and

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- d. Does not have business relationship, directly or indirectly related to the business activities of the Public Company.

Pada tahun 2016, Perseroan memiliki 1 orang Komisaris Independen, yaitu Thomas Honggo Setjokusumo dari 2 orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, ASSA telah memenuhi ketentuan dengan memiliki 1 orang Komisaris Independen.

In 2016, the Company has one Independent Commissioners, namely Thomas Honggo Setjokusumo of 2 members of the Board of Commissioners. Thus, ASSA has fulfilled the requirements to have 1 Independent Commissioner.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen di ASSA harus membuat pernyataan independensi untuk menyatakan status independensinya. Ia wajib melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya, termasuk apabila terdapat perubahan kepemilikan saham, baik pribadi ataupun keluarga, di ASSA dan atau perusahaan lain.

Independence Statement of Independent Commissioner

ASSA Independent Commissioner must make a statement of independence for their independent status. He must report if there is a status change affecting his independence, including when there is a change of share ownership, either individual or family, at ASSA and other companies.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS



**Surat Pernyataan Independen
PT Adi Sarana Armada Tbk**

Saya pula berpendapat dengan dia

Name : Thomas Hobbes Scholasticism

Tempat/tanggal lahir : Bogorok, 14 Mei 1966

Alamat : Jl. Kedondong No. 17, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006,
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung,
Jakarta Timur

2000-02-03 10:45:00 1999-01-01 00:00:00

PT Ad Space Agency, Tbk. | Cikarang, Bekasi

Dokument erstellt am 10.08.2018

1. Tidak memiliki hubungan kerabat, hubungan kipengunjuran, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Penyejuk Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi ketegangan diri untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Perseroan.
 2. Apabila dikenakan hari ditentukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, maka saya berwajib untuk melepasan jabatan Komisaris Independen sejauh bersedia untuk digantikan.

Dominikan pernyataan independensi caja, yang tidak saya buat dengan sebenar benar-benar.

Jakarta, 27 July 2013

Mengakar

Prairie



Direktor: Prof. Dr. phil. habil. Michael Schäfer
Vice-Direktor: Prof. Dr. phil. habil. Michael Schäfer

Thomas Moesgoe Setiokusumo
Komunitas Indonesia

◎ 本世纪以来的

Branche	Waren	Produktionsstandort	Vertriebsstandort	Umsatz	Gewinn	Umsatzanteil	Gewinnanteil
Möbel	Obi-Büro-Schreibtische	Arbeitsgruppe 1	Office Max	€ 11.400,-	€ 1.000,-	10%	9%
Haushalt	Obi-Küchen- und Bademöbel	Arbeitsgruppe 2	Office Max	€ 11.400,-	€ 1.000,-	10%	9%
Familienwirtschaft	Obi-Haushaltsgeräte	Arbeitsgruppe 3	Office Max	€ 11.400,-	€ 1.000,-	10%	9%
Lampen	Obi-Lampen	Arbeitsgruppe 4	Office Max	€ 11.400,-	€ 1.000,-	10%	9%
Kunststoff	Obi-Kunststoffmöbel	Arbeitsgruppe 5	Office Max	€ 11.400,-	€ 1.000,-	10%	9%

PT Auto Lancer Automobile Tbk
Head Office:
Jl. Gajah Mada No. 882, Lubang
Jatinangor, Cimahi, 41100, Indonesia
(+62 361) 411000 ext. 11
(+62 361) 41388888



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Komite di Bawah Dewan Komisaris

- Komite Audit

Komposisi Komite Audit ASSA tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013. Perseroan memiliki Komite Audit dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No 002/SK/BOC/ASA/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	:	Thomas Honggo Setjokusumo
Anggota	:	Timotius AK
Anggota	:	Linda Laulendra

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Thomas Honggo Setjokusumo

Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen ASSA pada tahun 2012. Beliau meraih gelar Master of Science in Marketing dan Master of Business Administration in Finance dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1990, dan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Beliau mengawali karir sebagai Dosen dan Staf Pengajar Profesional sejak tahun 1986 hingga sekarang di Universitas Indonesia.

Di sepanjang karirnya, beliau telah menempati beberapa posisi penting, seperti Komisaris Independen PT. Astra Aviva Life (2015-sekarang), anggota Komite Audit PT Tigaraksa Satria Tbk (2006-2013) (2014-sekarang), anggota Komite Audit PT. Hero Supermarket Tbk (2016 – sekarang), anggota Komite Audit PT. Astra Sedaya Finance (2016 – sekarang), anggota Komite Audit PT. Toyota Astra Finance (2016 – sekarang), anggota Komite Audit PT Surya Artha Nusantara Finance (2011-2014), dan anggota Audit PT Astra Otoparts Tbk (2011-2015), anggota Komite Audit PT Federal International Finance (2010-2012). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional di Ikatan Akuntan Indonesia.

Committees Under Board of Commissioners

- Audit Committee

Composition of ASSA Audit Committee did not change since 2013. The Company has Audit Committee for the implementation of Good Corporate Governance. Audit Committee is established based on Decree No.002/SK/BOC/ASA/II/2013 dated February 22, 2013 with the compositions as follows:

Head of Committee	:	Thomas Honggo Setjokusumo
Member of Committee	:	Timotius AK
Member of Committee	:	Linda Laulendra

Qualification of Audit Committee's Education and Work Experience

Thomas Honggo Setjokusumo

Indonesian citizen, 52 years old. Served as Independent Commissioner for ASSA in 2012. He received his Master Degree of Science in Marketing and Master of Business Administration in Finance from University of Wisconsin, Madison USA in 1990 and Bachelor Degree of Economy in Accounting from Economy Faculty of University of Indonesia in 1987. He started his career as Lecturer and Professional Teaching Staff since 1986 until present at University of Indonesia.

Throughout his professional career, he has held several important positions, such as Independent Commissioner of PT. Astra Aviva Life (2015-present), member of the Audit Committee of PT Tigaraksa Satria Tbk (2006-2013) (2014-present), member of the Audit Committee of PT. Hero Supermarket Tbk (2016 - present), member of the Audit Committee of PT. Astra Sedaya Finance (2016 - present), member of the Audit Committee of PT. Toyota Astra Finance (2016 - present), member of the Audit Committee of PT Surya Artha Nusantara Finance (2011-2014), and member of the Audit Astra Otoparts (2011-2015), member of the Audit Committee of PT Federal International Finance (2010-2012). Currently, he also serves as a member of the Certification Council of Professional Accountants in Indonesian Accountants Association.

Dr. Timotius AK

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit ASSA pada tahun 2013. Beliau meraih gelar Doctor of Agriculture Economics-Bogor Institute of Agriculture (IPB) pada tahun 2000, Master in Management (MM)-University of Indonesia pada tahun 1990, Bachelor of Accounting, Faculty of Economics-University of Indonesia pada tahun 1992, Bachelor of Management Finance, Faculty of Economics-University of Indonesia pada tahun 1984.

Di sepanjang karirnya, beliau telah menempati beberapa posisi penting, seperti anggota Komite Audit di PT Indofood CBP Tbk (2010 - 2015), PT Indofood Sukses Makmur (2009 - 2015), PT Bank Ina Perdana (2007 - sekarang), PT HM Sampoerna Tbk (2001 - 2011), Komisaris di PT Kharisma Valas Indonesia (1998 - 2008), Direktur PT Suprawira Finance (1996 - 1998), PT Moritas Agrobi (1990 - 1996), Asisten Finance Direktur di PT Barito Pacifi Timber (1990), Accounting Manager di PT Prima Palm Indah (1987 - 1988), Acc & Finance Manager di PT Prabu Pura Motor (1980 - 1987). Beliau juga aktif sebagai asisten dekan di School of Economics Jayakusuma (2001-sekarang) dan sebagai dosen dan Staf Pengajar Profesional di beberapa universitas ternama di Indonesia.

Linda Laulendra

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjadi anggota Komite Audit ASSA pada tahun 2013. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di sepanjang karirnya, beliau telah menempati beberapa posisi penting, seperti Legal and Human Resource Manager PT Fajar Surya Wisesa (2001 - 2011), Investment Portfolio Manager PT Astra International Tbk (1998 - 2011), Project Coordinator PT Fajar Surya Wisesa (1995 - 1997), Property Development Mayapada Group (1991 - 1995), Project Coordinator Wapoda Group (1989 - 1991), Financial Controller Automobile Business Mayapada Group (1984 - 1988), dan Asistant Auditor Siddharta Public Accountant (1978 - 1983). Beliau juga pernah aktif sebagai dosen Financial Management dan Accounting.

Dr. Timotius AK

Indonesian citizen, 57 years old, serving as Audit Committee of ASSA since 2013. He was awarded Doctor of Agriculture Economics- Bogor Institute of Agriculture (IPB) in 2000, Master in Management (MM)- University of Indonesia in 1990, Bachelor of Accounting- Faculty of Economics, University of Indonesia in 1992, Bachelor of Management Finance Faculty of Economics, University of Indonesia in 1984.

During his career, he served several key positions which are Audit Committee member of PT Indofood CBP Tbk (2010-present), PT Indofood Sukses Makmur (2009-present), PT Bank Ina Perdana (2007-present), PT HM Sampoerna Tbk (2001-2011), Commissioner in PT Kharisma Valas Indonesia (1998-2008), Director in PT Suprawira Finance (1996-1998), PT Moritas Agrobi (1990-1996), Assistant of Finance Director in PT Barito Pacific Timber (1990), Accounting Manager in PT Prima Palm Indah (1987-1988), Accountant & Finance Manager in PT Prabu Pura Motor (1980-1987). He also actively serves as Dean Assistant in School of Economics Jayakusuma (2001-present) and as a Lecturer and Professional Lecturer Staff in several reputable universities in Indonesia.

Linda Laulendra

Indonesian citizen, 57 years old. Appointed as Audit Committee of ASSA in 2013. She was awarded Bachelor of Economics from Faculty of Economy, University of Indonesia. During her career, she served in several key positions, such as Legal and Human Resource Manager of PT Fajar Surya Wisesa (2001-2011), Investment Portfolio Manager of PT Astra International Tbk (1998-2011), Project Coordinator of PT Fajar Surya Wisesa (1995-1997), Property Development Mayapada Group (1991-1995), Project Coordinator of Wapoga Group (1989-1991), Financial Controller Automobile Business Mayapada Group (1984-1988), Assistant Auditor of Siddharta Public Accountant (1978-1983). She also activley serves as Lecturer of Financial Management and Accounting.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas Perseroan, terutama berkenaan dengan kualitas dan transparansi laporan keuangan yang disampaikan Manajemen, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta beberapa tugas lain yang meliputi :

1. Melakukan penelaahan dan diskusi dengan pihak manajemen terhadap laporan keuangan yang diterbitkan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan terhadap pemeriksaan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
3. Melakukan penelaahan dan berdiskusi dengan internal auditor Perseroan mengenai aktivitas audit dan rencana audit tahun berjalan;
4. Menelaah temuan-temuan penting dari internal audit dan memonitor implementasinya dari rekomendasi tersebut;
5. Menelaah dan mendiskusikan dengan pihak manajemen mengenai rencana dan aktivitas manajemen risiko Perseroan;
6. Melakukan penelaahan dan berdiskusi dengan pihak manajemen atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
7. Memberikan rekomendasi pada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan Publik yang akan ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan

Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Komite Audit terbebas dari hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham utama dan/ atau dengan pengendali utama. Komite Audit terdiri dari para profesional di bidangnya, yang mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris.

Description of Duties and Responsibilities

Based on the Audit Committee Charter, the Audit Committee is established by the Board of Commissioners to assist its responsibility as the supervisor of the Company primarily related to the quality and transparency of Financial Statements reported by the management and identify other aspects which require Board of Commissioners concern and other duties including:

1. To review and discuss with the management regarding Financial Statements issued by the Company;;
2. To review the audit from public accountant to ensure every significant risk has been considered;
3. To review and discuss with the internal auditor regarding annual audit activity and audit plan;
4. To review significant findings of internal audit and monitor the implementation of the recommendations;
5. To review and discuss with the management regarding risk management plan and activity of Company's risk management.
6. To review and discuss with the management regarding compliance of the Company to relevant laws and regulations.
7. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountant to be commissioned for examining the company's financial statements

Independency of Audit Committee Member

Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in conducting its duties. Member of the Audit Committee does not have any financial, managerial, share ownership and/or family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors and/or majority shareholders and/or with the Company. The Audit Committee consists of several professionals in their fields, who supervise and provide recommendations to the Board of Commissioners

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Komite Audit sebanyak lima kali, dengan melakukan pembahasan terkait beberapa agenda, yaitu:

1. Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q4 2015
2. Review laporan keuangan 2015 dengan eksternal auditor
3. Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q1 2016
4. Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q2 2016
5. Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q3 2016

Hasil dari semua pembahasan dan penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Perseroan, serta telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Frekuensi Pertemuan dan Kehadiran Komite Audit selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Brief Report of Audit Committee's Duty Implementation

During 2016, the Audit Committee conducted 5 meetings, with discussions related to several agenda, namely:

1. Review of Q4 2015 financial statements and internal audit report
2. Review of 2015 financial statements with external auditor
3. Review of Q1 2016 financial statements and internal audit report
4. Review of Q2 2016 financial statements and internal audit report
5. Review of Q3 2016 financial statements and internal audit report

Results of all the discussions and reviews conducted by the Audit Committee were presented to the Board of Commissioners and Management of the Company, as well as followed up by the management.

Frequency of Meetings and Attendance of Audit Committee in 2016 is as follows:

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Kehadiran Attendance		
		Thomas Honggo Setjokusumo	Timotius AK	Linda Laulendra
		Ketua Chairman	Anggota Member	Anggota Member
29 Jan, 2016	Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q4 2015 <i>Review of Q4 2015 financial statements and internal audit report</i>	v	v	x
22 Maret 2016	Review laporan keuangan 2015 dengan eksternal auditor <i>Review of 2015 financial statements with external auditor</i>	v	v	v
22 April 2016	Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q1 2016 <i>Review of Q1 2016 financial statements and internal audit report</i>	v	x	v
July 29, 2016	Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q2 2016 <i>Review of Q2 2016 financial statements and internal audit report</i>	v	v	v
21 Oct, 2016	Review laporan keuangan dan laporan internal audit Q3 2016 <i>Review of Q3 2016 financial statements and internal audit reports</i>	v	x	v
Jumlah rapat Number of meetings		5	5	5
Jumlah kehadiran dan Persentase Total attendance and percentage		5 (100%)	3 (60%)	4 (80%)

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pentingnya pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi bagi Perseroan dilandaskan pada Pedoman Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 mengenai Komite Penunjang Dewan Komisaris. Dalam industri jasa keuangan non perbankan Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Hingga 31 Desember 2016, Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan, yaitu:

Ketua	: Hadi Kasim*) (Presiden Komisaris)
Ketua	: Erida *) (Presiden Komisaris)
Anggota	: Rudyanto Hardijanto (Komisaris)
Anggota	: Thomas Honggo Setjokusumo (Komisaris Independen)

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

Profil Komite

Hingga 6 Juni 2016, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dijabat oleh Hadi Kasim, yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris ASSA. Setelah Hadi Kasim mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut disetujui peserta RUPST pada 6 Juni 2016, posisinya digantikan oleh Erida dan sudah diterima peserta RUPST. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dirangkap oleh Dewan Komisaris dan profilnya telah diuraikan pada profil Dewan Komisaris.

Tugas Komite

- Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar pencalonan anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris memenuhi persyaratan dan penempatan pada fungsi yang sesuai dengan pedoman tata kelola perusahaan. Komite juga melakukan kajian dan masukan untuk persetujuan tertulis Komisaris atas usulan pencalonan Komisaris dan Direksi.

Nomination and Remuneration Committee

The importance of the Company's Nomination and Remuneration Committee formation is based on the General Guidelines of the National Committee of Governance (NCG) of 2006 concerning the Supporting Committee of the Board of Commissioners. In the non-banking financial services the Nomination and Remuneration Committee is formed in order to support the effectiveness of the implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners.

Until December 31, 2016, Structure and Remuneration Committee The Nomination Committee of the Company, namely:

Chairman	:Hadi Kasim*) (President Commissioner)
Chairman	:Erida **) (Chairman)
Members	:Rudyanto Hardijanto (Commissioner)
Member	:Thomas Honggo Setjokusumo (Independent Commissioner)

*) Hadi Kasim resigned as Chairman and resignation ASSA itself accepted the AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replace Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Committee Profile

Until June 6, 2016, Head of Nomination and Remuneration Committee was served by Hadi Kasim, who also served as President Commissioner of ASSA. After Hadi Kasim resigned and the resignation was approved by AGM participants on June 6, 2016, his position was replaced by Erida which was also accepted by AGM participants. Nomination and Remuneration Committee Member has concurrent position as Board of Commissioner and its profile has been described in Board of Commissioner's profile.

Committee's Duties

- Arranging nomination selection and procedure criteria of members of Board of Commissioners and Board of Directors, thus the nominations of Board of Directors and Commissioners members meet the qualification and are placed in the positions that are in line with guideline of Corporate Governance. The Committee also reviews and provides recommendations of written approval of Board of Commissioners for nomination proposal of Commissioners and Directors.

- Memberikan rekomendasi kebijakan tentang remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar anggota Dewan Komisaris dan Direksi memperoleh kompensasi yang adil dan layak (*fair and deserve*) sesuai tugas, tanggung jawab serta kinerjanya masing-masing berdasarkan sistem remunerasi Perseroan. Kebijakan mengenai besaran gaji, *benefit*, tunjangan dan fasilitas mengacu pada perkembangan pasar dan industri sejenis. Tingkat kompetitif besaran gaji dan tunjangan Komisaris dan Direksi dievaluasi setiap tahun bila dianggap perlu dan komite merekomendasikan penyesuaian kepada Dewan Komisaris.
- Menyusun laporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang di atas untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya akan dilaporkan kepada para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk mendapat persetujuan dan penetapan Pemegang Saham.
- Melakukan kajian dan penilaian terhadap opsi saham (*share ownership plan/stock option*) bagi Komisaris dan Direksi serta karyawan.
- Memberikan pendapat dan usulan bagi manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai aspek-aspek sumber daya manusia, antara lain tentang sistem penggajian, sistem pensiun, masalah hubungan industrial dan kepatuhan terhadap asas-asas GCG
- Providing recommendation for the policy of Board of Commissioners and Directors members remuneration, thus Board of Commissioners and Directors members receive fair and deserve compensation in line with their duties, responsibilities, and performances based on Company's remuneration system. Policy of total salary, benefit, allowance and facility refers to the development of similar market and industry. Competitive level of total salary and allowance of Board of Commissioners and Directors is evaluated every year if necessary, and the Committee recommends their adjustments to Board of Commissioner.
- Preparing report of duties and responsibilities implementation above to be reported to Board of Commissioners and later will be reported to shareholders through Annual General Meeting to get the approval from shareholders.
- Reviewing and assessing share ownership plan/stock option for Commissioners and Directors as well as employees.
- Providing opinion and recommendation for management through Board of Commissioners regarding aspects of Human Resources, such as payroll system, pension system, industrial relation and compliance of GCG principles.

Tanggung jawab Komite

1. Meninjau kinerja komisaris saat ini.
2. Menilai kebutuhan untuk komisaris baru.
3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi keterampilan, latar belakang, keragaman (jenis kelamin, latar belakang etnis, dan pengalaman), dan pengetahuan calon komisaris.
4. Memiliki proses nominasi kandidat yang memenuhi syarat objektif.
5. Membantu dalam pemilihan komisaris baru yang berkualitas.

Committee's Responsibilities

1. Monitoring Commissioner's performance.
2. Evaluating the needs of new Commissioner.
3. Identifying and evaluating skill, background, diversity (gender, ethnic background, and experience) as well as knowledge of candidate of Commissioner.
4. Having nomination process that fulfills objective qualification.
5. Assisting election of new qualified Commissioners.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Independensi Komite

Komite Nominasi dan Remunerasi secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terbebas dari hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham utama dan/atau dengan Perusahaan. Komite Audit terdiri dari para profesional di bidangnya, yang mengawasi dan memberi saran kepada Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari Komisaris Perseroan yang tidak berafiliasi dan tidak menerima kompensasi apapun selain fee pertemuan Dewan Komisaris dan yang terkait dengan komite. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalin transparansi dan pengungkapan analisis dan meminta untuk dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sebanyak 1 kali, dengan melakukan pembahasan terkait dua agenda, yaitu:

1. *Salary Review*
2. *Performance Bonus 2017*

Hasil dari semua pembahasan dan penelaahan yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi telah disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Manajemen Perseroan, serta telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Frekuensi Pertemuan dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2016 dilakukan pada 6 Desember 2016 dengan kehadiran sebagai berikut :

Committee's Independency

Nomination and Remuneration Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in conducting its duties. Member of the Audit Committee does not have any financial, managerial, shareownership and/or family relationship with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Majority Shareholders and/or with the Company. The Audit Committee consists of several professionals in their fields, who supervise and provide recommendations to the Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee consists of Commissioners of the Company who are not affiliated and do not accept any compensation, except fee of Board of Commissioners meeting and related with the Committee. Nomination and Remuneration Committee establishes transparency and disclosure of analysis and requests to be included in the Company's annual report.

Brief Report of Nomination and Remuneration Committee Activity Implementation

During 2016, Nomination and Remuneration Committee conducted 1 meeting, with discussion related to two agenda, namely:

1. Salary Review
2. 2017 Performance Bonus

The results of all the discussions and the reviews conducted by the NRC have been submitted to the Board of Commissioners and Management of the Company, and have been followed up by the management.

Frequency of Meetings and Attendance of Nomination and Remuneration Committee during 2016 conducted on December 6, 2016 with the following attendance:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting agenda</i>	<i>Kehadiran</i> <i>Attendance</i>		
		Hadi Kasim *	Erida **)	Thomas Honggo <i>Setjokusumo</i>
		Ketua <i>Chairman</i>	Anggota <i>Member</i>	Anggota <i>Member</i>
December 6th, 2016	Salary Review dan Performance Bonus 2017 <i>Salary Review and Performance Bonus 2017</i>	1	1	1
Jumlah Rapat <i>Number of Meeting</i>		1	1	1
Jumlah Kehadiran dan Persentase <i>Number and Percentage of Attendance</i>		1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Komite-komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Hingga akhir tahun 2016, ASSA hanya memiliki dua komite, yakni Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Tidak ada komite-komite lain selain itu.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris dapat bertindak sebagai Humas yang melaksanakan hubungan antara Dewan Komisaris dan jajaran manajemen. Oleh karena itu, Sekretaris Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam aspek implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Pada tahun 2016. posisi Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Reny Yulistina Anggoro.

Other Committees under Board of Commissioners

By the end of 2016, ASSA only had two committees, namely Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. There were no other committee besides them.

Secretary of Board of Commissioners

Board of Commissioners' Secretary can also serve as Public Relation bridging relationship between the Board of Commissioners and management. Thus, Board of Commissioners' Secretary must have sufficient knowledge in implementing his/her duties, including aspects of Good Corporate Governance implementations. In 2016, Board of Commissioners Secretary was served by Reny Yulistina Anggoro.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolegial terutama dalam memimpin dan mengelola jalannya pengurusan Perusahaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan termasuk kapabilitas untuk mewakili Peusahaan di luar dan di dalam pengadilan. Pelaksanaan tugas Direksi dibatasi oleh ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Susunan Direksi

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 6 Juni 2016, Perseroan menetapkan susunan Direksi sebagai berikut

Presiden Direktur	:	Prodjo Sunarjanto SP
Direktur	:	Hindra Tanujaya
Direktur	:	Maickel Tilon
Direktur	:	Jany Candra
Direktur Independen	:	Alexander Sukanta

Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*)

Seiring dengan wujud komitmen dan implementasi GCG di Perseroan yang berkelanjutan dan dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan, maka anggota Direksi memiliki Pedoman (*Board Manual*), terutama untuk memimpin dan mengelola jalannya Perseroan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan. *Board Manual* ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga harus dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perseroan tersebut. *Board Manual* ini merupakan salah satu *softstructure* GCG, sebagai penjabaran dari pedoman tata kelola perusahaan yang mengacu pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors is the company organ that is collegially responsible especially in leading and managing the course of Company's management in accordance with the vision, mission and objectives of the Company, including the capability to represent the Company outside and inside the court. Execution of duties of Directors is limited by the provisions of the Article of Association and Legislation.

Composition of Board of Directors

Based on decisions of Annual General Meeting on June 6, 2016, the composition of Company's Board of Directors are as follows:

President Director	:	Prodjo Sunarjanto SP
Director	:	Hindra Tanujaya
Director	:	Maickel Tilon
Director	:	Jany Candra
Independent Director	:	Mr. Alexander Sukanta

Working Guidelines of Board of Directors (*Board Manual*)

Along with the commitment and implementation of sustainable GCG in the Company and in order to manage the Company's mission and achieve the vision that have been established, members of the Board of Directors have the Board Manual in leading and managing the Company in accordance with the vision, mission and purpose of the Company. Board Manual is a dynamic document, thus it has to be evaluated periodically and adjusted with applicable regulations.

Board Manual is a guideline that explains in general matters related to working procedures of Board of Directors and Board of Commissioners as well as process of function relationship between Directors, Board of Commissioners and between both Company's organs. Board Manual is one of GCG softstructures, as an explanation of corporate governance that refers to Article of Association and applicable regulations.

Hal-hal terkait fungsi Direksi yang diatur dalam *Board Manual* adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum
- b. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Independensi (Kemandirian) Direksi
- e. Etika Jabatan Direksi
- f. Susunan, Tugas dan Wewenang Direksi
- g. Rapat Direksi
- h. Evaluasi Kinerja Direksi
- i. Fungsi Pendukung
- j. Hubungan Perseroan dengan Anak Perusahaan

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Anggota Direksi

Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, Direksi ASSA memiliki beberapa tugas pokok, antara lain:

1. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku;
2. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis Perusahaan dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*);
3. Menyelenggarakan Rapat Direksi Perusahaan secara memadai;
4. Menetapkan struktur organisasi Perusahaan lengkap divisi dan unit usaha;
5. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki Perusahaan secara efektif dan efisien;
6. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya (istri/suami dan anak-anak) pada Perusahaan dan perusahaan lainnya (Daftar Khusus);
7. Membentuk sistem pengendalian internal Perusahaan dan managemen risiko;
8. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Perusahaan.

Matters related to Directors' function regulated in *Board Manual* are as follows:

- a. General Policies
- b. Qualifications and Compositions, Membership and Tenure of Board of Directors
- c. Orientation and Capability Improvement Program
- d. Independency of Board of Director
- e. Position Ethics of Board of Director
- f. Composition, Duties and Authority of Board of Director
- g. Directors' Meeting
- h. Evaluation of Board of Directors' Performance
- i. Supporting Function
- j. Company's Relationship with Subsidiaries

Duties, Responsibilities and Authority of Board of Directors

In carrying out the Company's management, Board of Directors of ASSA has several main duties, among others:

1. Manage the Company in accordance with his/her authority and responsibility as stipulated in the Article of Association, applicable regulations and *Good Corporate Governance* principles (GCG);
2. Set the vision, mission and values as well as the Company's strategic plan in the form of corporate plan and business plan;
3. Organize adequate Meetings of Board of Directors;
4. Establish company's organizational structure with divisions and business units;
5. Control Company's human resources effectively and efficiently;
6. Establish and keep Register of Shareholders and Shareownership List of members of Board of Directors and Board of Commissioners and their families (wife/husband and children) in the Company and other companies (Special List);
7. Establish internal control system and risk management;
8. Take into account the interest of the Company's stakeholders.

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Ruang Lingkup Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) memiliki kedudukan yang setara, dimana Presiden Direktur memiliki tugas untuk mengkoordinir kegiatan Direktur-direktur lain dalam mengelola Perusahaan.

Pembagian tugas masing-masing anggota Direksi ASSA sebagai berikut:

a. Presiden Direktur

Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh usaha, pencapaian misi dan rencana kerja serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi Perseroan.

b. Direktur Keuangan dan SDM

- Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan, akuntansi dan pajak serta *control and budgeting* baik untuk kebutuhan operasional maupun fungsional Perseroan sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan usaha.
- Melakukan negosiasi dengan bank dan kreditur.
- Mencari dana pinjaman untuk kebutuhan Perseroan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif.
- Membawahi dan menjamin kelancaran usaha operasional Divisi Accounting, Divisi Finance, Divisi HRD, Divisi Procurement, Divisi Legal.

c. Direktur Bisnis dan Layanan

- Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi Perseroan.
- Membawahi Divisi Layanan Purna Jual, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Komunikasi dan Pemasaran, Divisi Management Proses Bisnis, Divisi Galeri Mobil.

d. Direktur Operasional

- Membawahi dan menjamin kelancaran usaha pada Divisi Bisnis Rental, Divisi Pelanggan Prioritas, Divisi Hubungan Pelanggan dan Divisi Logistik.

e. Direktur tidak terafiliasi

- Membawahi dan menjamin kelancaran usaha pada Divisi General Affairs.

Scope of Board of Directors' Responsibilities

Each member of the Board of Directors (including President Director) has equal position, where the President Director has a duty to coordinate the activities of other Directors in managing the company.

The division of duties of each member of Board of Directors of ASSA are as follows:

a. President Director

Is responsible for all businesses management, the achievement of mission and work plan as well as the empowerment and development of the Company's organization.

b. Finance and Human Resources Director

- Is responsible for financial, accounting, and tax management, as well as control and budgeting, both for Company's operational and functional need, so it can support business activity smoothness.

- Negotiate with Banks and creditors.

- Seek for loan fund for Company's need with competitive interest rate.

- Supervise and ensure operational smoothness of Accounting Division, Finance Division, Human Resource Division, Procurement Division, and Legal Division.

c. Business and Services Director

- Responsible for the smooth running of all businesses in the empowerment and development of Company's organization.

- Oversee After-Sales Service Division, Information Technology Division, Communications and Marketing Division, Business Process Management Division, Car Gallery Division.

d. Operational Director

- Supervise and ensure the smooth running of business in the Rental Business Division, Priority Customer Division, Customer Relations Division and Logistics Division.

e. Unaffiliated Director

- Supervise and ensure the smooth running of business in the General Affairs Division

Frekuensi Rapat Direksi 2016

Direksi Perseroan telah melakukan rapat sebanyak 12 kali guna membahas kendala dan pencapaian dalam pengelolaan Perseroan.

Frequency of Directors' Meetings in 2016

Board of Directors of the Company held 12 (twelve) meetings in order to discuss the obstacles and achievement in managing the Company.

Tanggal Date	Presence				
	Prodjo Sunarjanto SP	Hindra Tanujaya	Maickel Tilon	Jany Candra	Alexander Sukanta
	Presiden Direktur President Director	Direktur Director	Direktur Director	Direktur Director	Direktur Independent Director
19-20 January 2016	1	1	1	1	1
29 February 2016	1	1	1	1	1
March 27, 2016	1	1	1	-	1
20 April 2016	1	1	1	1	1
May 2016	1	1	1	1	1
June 22, 2016	1	1	1	1	1
26-27 July 2016	1	1	1	1	1
August 29, 2016	1	1	1	1	-
27 September 2016	1	1	1	1	1
October 11, 2016	1	1	1	1	1
28 November 2016	1	1	1	1	1
December 6th, 2016	1	1	1	1	1
Jumlah rapat Number of meetings	12	12	12	12	12
Jumlah kehadiran dan Persentase Total attendance and percentage	12 (100%)	12 (100%)	12 (100%)	11 (91%)	11 (91%)

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Perseroan mengacu pada Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dipilih dengan kriteria dan kualifikasi yang kompeten.

The Diversity of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Management of the Company refers to Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company in which the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is selected by competent criteria and qualifications.

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Hadi Kasim *)	Presiden Komisaris President Commissioner	Diploma Insinyur Diploma of Engineering	58	Male
Erida **)	Presiden Komisaris President Commissioner	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	51	Female
Rudyanto Hardjanto	Komisaris Commissioner	Sarjana Teknik Bachelor of Engineering	74	Male
Thomas Honggo Setjokusumo	Komisaris Commissioner	Master Bisnis Master of Business	53	Male

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Prodjo Sunarjanto SP	Presiden Direktur President Director	Master Akuntansi Master of Accounting	57	Male
Hindra Tanujaya	Direktur Director	Master Manajemen Master of Management	51	Male
Jany Candra	Direktur Director	Master Manajemen Master of Management	44	Male
Maickel Tilon	Direktur Director	Diploma Diploma	46	Male
Alexander Sukanta	Direktur Independen Independent Director	Diploma Insinyur Diploma of Engineering	59	Male

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.
 **) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.
 **) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

Direksi dituntut untuk bisa bekerja sama dengan organ Perseroan yang lain. Sebab itu, ASSA memberikan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru. Program pengenalan bisa melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dan sebagainya. Tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan untuk anggota Komisaris baru ini berada di pundak Presiden Direktur , atau jika Presiden Direktur berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan tersebut berada pada Presiden Komisaris, atau anggota Direksi lain yang ditunjuk.

Adapun program pengenalan untuk anggota Direksi baru, antara lain, meliputi:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *Good Corporate Governance*;
2. Gambaran Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;

Orientation Program For New Members of Board of Directors

Board of Directors are required to cooperate with other Company's organs. Therefore, ASSA provides orientation program for new Board members. The orientation program can be through presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to Regional Offices and Branch Offices and so on. Responsibility for the orientation program implementation for new members of Commissioner rests with the President Director, or if the Director is absent, the responsibility for orientation program implementation is on the President Commissioner, or another appointed member of Board of Directors.

The orientation program for new members of Board of Directors, among others, includes:

1. Principles and implementation of Good Corporate Governance;
2. Description of the Company related to the objectives, nature, scope of activities, financial and operations performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
3. Information relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as audit committee;
4. Description of duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors;

5. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan.
5. Various applicable laws and regulations, and corporate policies.

Secara berkala, Perseroan mengadakan program pengembangan diri bagi Direksi dengan agenda dan materi sesuai dengan kebutuhan Direksi dan Perseroan.

Periodically, the Company holds self-development program for the Board of Directors with the agenda and materials in accordance with the needs of Board of Directors and the Company.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Direksi

Direksi terus melakukan peningkatan kompetensinya dengan mengikuti berbagai forum dan pelatihan guna meningkatkan kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2016, Direksi ASSA telah melakukan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Tabel pelatihan, *workshop*, seminar yang diikuti Direksi selama 2016

No.	Seminar/Pelatihan Training	Penyelenggara Pelatihan Training Operator	Waktu & Tempat Pelaksanaan Time & Place of Training	Peserta Participant
1	Indonesia Economy Outlook	Triputra	September, 2016	Seluruh Jajaran Direksi <i>The entire Board of Directors</i>
2	Executive Committee	Triputra	September, 2016	Seluruh Jajaran Direksi <i>The entire Board of Directors</i>

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi juga melaksanakan rapat gabungan yang membahas berbagai persoalan strategis Perseroan. Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan sebanyak 6 kali rapat gabungan. Tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut:

Training and Capability Development of Board of Directors

The Directors continue to increase their competencies by participating in various forums and training to improve the performance of the Company. Throughout 2016, ASSA Board of Directors has conducted the following competency development:

Table of trainings, workshops, seminars followed by the Board of Directors in 2016

Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors also hold joint meetings to discuss various Company's strategic issues. Throughout 2016, the Board of Commissioners and Board of Directors held 6 joint meetings. The level of attendance of each member at each meeting is as follow:

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Tanggal Date					
	Hadi Kasim*)	Erida**)	Rudyanto	Thomas Honggo Setjokusumo	
	Presiden Komisaris President Commissioner	Presiden Komisaris President Commissioner	Komisaris Hardjanto Commissioner Hardjanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	
February 16, 2016	1	-	1	1	
April 25, 2016	1	-	-	1	
June 14, 2016	1	-	-	1	
August 2, 2016	-	1	-	1	
October 31, 2016	-	1	-	1	
December 6, 2016	-	1	1	1	
Jumlah rapat Number of meeting	3	3	6	6	
Total attendance Percentage	3 (100%)	3 (100%)	2 (33%)	6 (100%)	

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Penilaian Kinerja (Assessment) Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menetapkan kriteria evaluasi kinerja Direksi dengan berdasarkan pada target kinerja yang dicanangkan setiap tahunnya. Usaha dan komitmen serta tercapai atau tidaknya target tersebut mempengaruhi kriteria penilaian terhadap Direksi yang akan dievaluasi setiap tahunnya oleh pemegang saham dalam RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Kinerja Direksi juga dievaluasi melalui mekanisme RUPS secara kolegial berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris Perusahaan pada dasarnya dilakukan oleh Presiden Komisaris secara berkala. Penilaian terhadap kinerja Direksi Perusahaan pada dasarnya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang mencakup:

1. Performance Planning

Performance Planning merupakan kegiatan awal dari *performance management* yang meliputi *Policy Deployment* yaitu transformasi dari visi dan misi Perusahaan serta rencana strategis tahunan Perusahaan yang dituangkan dalam *Corporate Annual Target (CAT)*;

Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors

Performance Assessment of Board of Commissioners and Board of Directors establishes the performance evaluation criteria based on performance target set every year. Effort and commitment as well as whether or not the target is achieved will affect the assessment criteria of the Board of Directors that will be evaluated annually by the shareholders at the AGM based on the recommendation of Board of Commissioners.

Directors' performance is also evaluated through the GMS mechanism collegially based on achievement of Key Performance Indicators (KPI) of the Company. Performance assessment of the Board of Commissioners is basically done by the President Commissioner periodically. Assessment of Board of Directors' performance is basically done by the Board of Commissioners that includes:

1. Performance Planning

Performance Planning is the initial activity of performance management which includes the *Policy Deployment* which is the transformation of corporate's vision and mission as well as company's annual strategic plan as outlined in the *Corporate Annual Target (CAT)*;

Kehadiran Attendance					
	Prodjo Sunarjanto SP	Hindra Tanujaya	Maickel Tilon	Jany Candra	Alexander Sukanta
	Presiden Direktur <i>President Director</i>	Direktur <i>Director</i>	Direktur <i>Director</i>	Direktur <i>Director</i>	Direktur Independen <i>Independent Director</i>
	1	-	1	1	1
	1	1	1	1	-
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1
	6	6	6	6	6
	6 (100%)	5 (83%)	6 (100%)	6 (100%)	5 (83%)

2. Performance Review

Performance Review merupakan proses review kinerja setiap anggota Direksi Perusahaan yang dilakukan secara periodik, meliputi *coaching*, konseling dan *control* untuk melihat pencapaian, permasalahan serta penyimpangan terhadap rencana

3. Performance Evaluation

Performance Evaluation merupakan proses penilaian kinerja anggota Direksi Perusahaan yang didasarkan pada *Process*, *Result/value Creation* dan *People Management* serta dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Hasil evaluasi kinerja tersebut di atas menjadi dasar Perusahaan untuk memberikan *Reward* atau *Penalty* kepada anggota Direksi Perusahaan.

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Perusahaan memberikan rekomendasi mengenai remunerasi bagi Direksi untuk dapat disampaikan kepada RUPS. Perumusan sistem remunerasi didasari prinsip-prinsip:

2. Performance Review

Performance Review is process of performance review of every member of Board of Directors which is carried out periodically, including coaching, counseling and control to reveal achievements, problems and deviations from the plan.

3. Performance Evaluation

Performance Evaluation is a performance assessment process of members of Board of Directors based on Process, Result/Value Creation and People Management and carried out periodically at least 1 (once) a year. The above performance evaluation results would form the basis for the Company to provide Reward or Penalty to the members of Board of Directors.

Determination of Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners provides recommendation regarding the remuneration of Board of Directors to be submitted to the AGM. The formulation of remuneration system is based on the following principles:

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

1. Sesuai peraturan perundangan di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Asas keterbukaan, keseimbangan internal serta kompetitif dengan perusahaan lain di luar Perusahaan;
3. Perusahaan memberikan remunerasi yang berbeda bagi anggota Direksi Perusahaan yang berkinerja terbaik;
4. Penetapan remunerasi menganut asas "Pay For Performance" dimana Perusahaan menghargai anggota Direksi sesuai kontribusinya terhadap Perusahaan. Struktur remunerasi Perusahaan mencakup *Annual Gross Basic Salary*, dan *Total Remuneration* setiap tahun Perusahaan melaksanakan survei gaji dan *benefit* yang bertujuan untuk mengetahui posisi remunerasi Direksi Perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan sejenis maupun lintas industri baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya Perusahaan mengevaluasi kebijakan remunerasi Direksi Perusahaan bila ada perubahan yang bersifat normatif sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan pada tahun 2016 kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp.13,863,231,000,-. Selama tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama manajemen Perseroan telah melakukan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan.

Struktur remunerasi Perseroan mencakup *Annual Gross Basic Salary*, dan *Total Remuneration* setiap tahun Perusahaan melaksanakan survei gaji dan *benefit* yang bertujuan untuk mengetahui posisi remunerasi Direksi Perseroan terhadap perusahaan-perusahaan sejenis maupun lintas industri baik secara internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengevaluasi kebijakan remunerasi Direksi bila ada perubahan yang bersifat normatif sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketenagakerjaan.

1. In accordance with applicable tax and manpower regulations;
2. The principle of openness, internal balance and competitive with other companies;
3. The Company provides different remuneration for members of Board of Directors who have the best performance;
4. Determination of remuneration follows the principles of "Pay For Performance" where Company appreciates members of Board of Directors in accordance with their contributions to the Company. The Company's remuneration structure covers Annual Gross Basic Salary and Total Remuneration. The company carries out salary and benefit survey every year which aims to determine the remuneration position of Board of Directors of the Company against similar companies as well as cross-industry both internally and externally. The Company evaluates remuneration policy of Directors when there are normative changes in accordance with the tax and manpower regulations.

Remuneration, ie salaries and other benefits paid in 2016 to the Directors of the Company amounted to RpRp.13,863,231,000,-. During 2016, the Nomination and Remuneration Committee together with management of the Company conducted a joint evaluation of the remuneration system applicable in the Company.

The Company's remuneration structure covers *Annual Gross Basic Salary* and *Total Remuneration*. The company carries out salary and benefit survey every year which aims to determine the remuneration position of Board of Directors of the Company against similar companies as well as cross-industry both internally and externally. The Company evaluates remuneration policy of Directors when there are normative changes in accordance with the tax and manpower regulations.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Major and Controlling Shareholders

PT Adi Dinamika Investindo	24,94%
PT Daya Adicipta Mustika	19,17%
Theodore Permadi Rahmat	5,97%
Prodjo Sunarjanto SP	9,71%
Hindra Tanujaya	0,91%
Jany Candra	0,91%
Maickel Tilon	0,91%
Masyarakat Public	37,48%

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan Atau Pengendali

Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dan Direksi ASSA

Disclosure of Affiliate Relations of Board of Commissioners, Directors and Major and Or Controlling Shareholders

Family and financial relationship of Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship With						Hubungan Finansial Dengan Financial Relationship With					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Lain Other Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Hadi Kasim *)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Erida **)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rudyanto Hardjanto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Thomas Honggo Setjokusumo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prodjo Sunarjanto SP	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hindra Tanujaya	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Maickel Tilon	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Jany Candra	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alexander Sukanta	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

DIREKSI
 BOARD OF DIRECTORS

Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Perusahaan mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan saham dan rangkap jabatannya, baik kepemilikan saham pada ASSA maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbarui setiap tahunnya.

Shareownership and Concurrent Position of Members of Board of Commissioners

The Company requires members of Board of Commissioners to disclose their shareownership and concurrent positions, both shareownership in ASSA or other companies, local and abroad in a report which must be updated annually.

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ASSA <i>Details of ASSA Board of Commissioners Shareownership</i>					
Kepemilikan Saham <i>Shareownership</i>					
Nama <i>Name</i>	ASSA <i>ASSA</i>	Triputra Investindo Arya	Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	Perusahaan Lain <i>Other companies</i>	Keterangan <i>Description</i>
Hadi Kasim *)	x	x	x	x	x
Erida **)	0.09%	x	x	x	x
Rudyanto Hardjanto	x	x	PT Duta Mitra Solusindo	x	0.2%
Thomas Honggo Setjokusumo	x	x	x	x	x

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris ASSA <i>Details of ASSA Board of Commissioners Shareownership</i>					
Kepemilikan Saham <i>Shareownership</i>					
Nama <i>Name</i>	ASSA <i>ASSA</i>	Triputra Investindo Arya	Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	Perusahaan Lain <i>Other companies</i>	Keterangan <i>Description</i>
Hadi Kasim*)	-	-	-	-	-
Erida **)	0,09%	x	x	x	x
Rudyanto Hardjanto	-	-	-	-	-
Thomas Honggo Setjokusumo	-	-	-	-	-

*) Hadi Kasim mengundurkan diri sebagai Presiden Komisaris dan pengunduran dirinya diterima dalam RUPST ASSA pada 6 Juni 2016.

**) Erida diangkat sebagai Presiden Komisaris menggantikan Hadi Kasim melalui RUPST ASSA pada 6 Juni 2016

*) Hadi Kasim resigned as President Commissioner and his resignation was accepted in ASSA AGM on June 6, 2016.

**) Erida was appointed as President Commissioner replacing Hadi Kasim through ASSA AGM on June 6, 2016

Kepemilikan Saham dan Rangkap Jabatan Direksi

Perusahaan mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan saham dan rangkap

Shareownership and Concurrent Position of Board of Directors

The Company requires members of Board of Directors to disclose their shareownerships and concurrent positions,

jabatannya, baik kepemilikan saham ASSA maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbarui setiap tahunnya.

both shareownership in ASSA or other companies, local and abroad in a report which must be updated annually.

Rangkap Jabatan Saham Direksi ASSA <i>Concurrent Positions of ASSA Directors</i>					
Kepemilikan Saham <i>Shareownership</i>					
Nama <i>Name</i>	ASSA	Triputra Investindo Arya	Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	Perusahaan Lain <i>Other companies</i>	Keterangan <i>Description</i>
Prodjo Sunarjanto SP	9,71%	x	PT Adi Sarana Logistik	-	0,5%
Hindra Tanujaya	0,91%	x	x	x	x
Maickel Tilon	0,91%	x	x	x	x
Jany Candra	0,91%	x	x	x	x
Alexander Sukanta	x	x	x	x	x

Rangkap Jabatan Saham Direksi ASSA <i>Concurrent Positions of ASSA Directors</i>					
Kepemilikan Saham <i>Shareownership</i>					
Nama <i>Name</i>	ASSA	Anak Perusahaan <i>Subsidiary</i>	Perusahaan Lain <i>Other companies</i>	Keterangan <i>Description</i>	
Prodjo Sunarjanto SP	Presiden Direktur <i>President Director</i>	v	x	0,5% PT Adi Sarana Logistik	
Hindra Tanujaya	Direktur Keuangan dan SDM <i>Director of Finance and Human Resources</i>	x	x	x	x
Jany Candra	Direktur Bisnis dan Layanan <i>Director of Business and Services</i>	x	x	x	x
Maickel Tilon	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	x	x	x	x
Alexander Sukanta	Direktur Independen <i>Independent Director</i>	x	x	x	x

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Perseroan membentuk Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan IX.I.4, No. KEP-63/PM/1996 dan posisinya berada dibawah Direksi, bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris atas laporan pelaksanaan tugasnya. Fungsi Sekretaris Perusahaan ini menjamin kelancaran komunikasi antara pemangku kepentingan dan Perseroan. Perseroan mengangkat Hindra Tanujaya sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/SKEP/BOD/ASA/VII/2012 pada tanggal 27 Juli, jabatan Sekretaris Perusahaan dirangkap oleh Direktur Keuangan Perseroan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Hindra Tanujaya

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, domisili di Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Keuangan ASSA sejak tahun 2007. Beliau meraih gelar Magister Manajemen dari IBII Jakarta pada tahun 2009 dan meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIEB Bandung pada tahun 1991. Di sepanjang karirnya, Beliau telah menempati beberapa posisi penting seperti Manajer Akuntansi PT Astra Internasional-Toyota Sales Operation (Auto 2000) (1991), General Manager Operational Mobil '88, PT Astra Internasional-Used Car (2006-2007), Presiden Direktur PT Duta Mitra Solusindo (2007-Sekarang), Presiden Direktur PT. Adi Sarana Logistik (2012 - Sekarang), Komisaris PT Adi Sarana Lelang (2013-sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertugas untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan masyarakat pemodal dan pemangku kepentingan lainnya. Selain bertanggung jawab atas komunikasi yang baik dan efektif, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam upaya pemenuhan kepatuhan atas hukum, ketentuan dan perundang- undangan yang berlaku lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal berikut ini:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

The Company formed Corporate Secretary by referring to the Regulation IX.I.4 No. KEP-63/PM/1996 and its position is under the Board of Directors, responsible to Board of Commissioners for its duty implementation report. Function of Corporate Secretary is to ensure smoothness of communication between stakeholders and the Company. The Company appointed Hindra Tanujaya as Corporate Secretary through Decree of Director No.002/SKEP/BOD/ ASA/VII/2012 on July 27. The Corporate Secretary position was concurrently served by Finance Director of the Company.

Corporate Secretary Profile

Hindra Tanujaya

Indonesian citizen, 50 years old domiciled in Jakarta. Served as Finance Director of ASSA since 2007. He received his Degree in Magister Management from IBII Jakarta in 2009 and received his Bachelor Degree in Accounting from STIEB Bandung in 1991. During his professional career, he has held several key positions, such as Accounting Manager of PT Astra Internasional-Toyota Sales Operation (Auto 2000) (1991), General Manager of Operational Mobil '88 (PT Astra Internasional-Used Car) (2006-2007), President Director of PT Duta Mitra Solusindo (2007-present), President Director of PT Adi Sarana Logistik (2012-present), and Commissioner of PT Adi Sarana Lelang (2013-present).

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

The Company Secretary is responsible for ensuring the smooth communication between the Company and investors and other stakeholders. Besides being responsible for good and effective communication, Corporate Secretary also plays a role in complying with law, provisions and other applicable regulations.

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary include the following:

1. Following the development of Capital Market, particularly prevailing laws and regulations in Capital Market.

2. Memberikan pelayanan kepada Investor atas setiap informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi Perusahaan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal, dengan bertujuan menciptakan dan memelihara komitmen baik Perusahaan di hadapan regulator;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Pasar Modal dan Investor;
5. Bekerja sama dengan Departemen Accounting untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.
2. Providing services to investors for every information required related to the aspect of information transparency of the Company.
3. Providing advices to Directors of the Company to comply with applicable regulations in Capital Market, with the purpose of creating and maintaining good commitment of the Company in front of regulator.
4. Being a bridge between the Company and Capital Market and Investor Authority.
5. Cooperating with Accounting Department to report the transparency of information of Financial Statement timely and accurately.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan melakukan korespondensi berupa informasi yang wajib disampaikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Informasi yang disampaikan berupa emiten kepada otoritas pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal (OJK dan KSEI), di antaranya mengenai:

- Laporan Bulanan Data Kewajiban Valas.
- Laporan Rencana dan agenda RUPST dan RUPSLB beserta Draft Iklan.
- Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan tahunan dan per triwulan.
- Penyampaian Laporan Tahunan.
- Pemberitahuan Penyelenggaraan *Public Expose* Perusahaan.
- Semua kewajiban pelaporan kepada otoritas pasar modal

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada 2016, program pelatihan dan pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Materi Pelatihan <i>Training materials</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Tempat dan Waktu Pelaksanaan <i>Date and Time of Training</i>
Indonesia Economy Outlook	Triputra	Jakarta, September, 2016
Executive Committee	Triputra	Jakarta, September, 2016
Workshop Keterbukaan Informasi Emiten dan Perusahaan Publik <i>Workshop on Information Disclosure of Issuers and Public Companies</i>	FSA	Jakarta, November, 2016

Duties and Responsibilities Implementation of Corporate Secretary

Corporate Secretary conducts correspondence in the form of information that should be reported as compliance to Capital Market regulations. Information reported is the issuer to the Capital market authority and Capital market supporting institutions (FSA and KSEI), regarding:

- Monthly report of foreign currency liability data
- Report of AGM and EGM plan and agenda as well as commercial draft
- Submission of Annual and quarterly Financial Report of the Company
- Submission of Annual Report
- Notification of the Company's Public Exposure event
- All reporting obligation to capital market authority

Training and Competency Development Program of Corporate Secretary

In 2016, training and competency development program of Company Secretary were as follows:

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Materi Pelatihan <i>Training materials</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>	Tempat dan Waktu Pelaksanaan <i>Date and Time of Training</i>
The Values of Collaboration for Modern Business - Gathering Debtor GBKF	BCA	Jakarta, November, 2016
Indonesia Economic Outlook	IDX	Jakarta, November, 2016

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2016, Perseroan telah mempublikasikan siaran pers dengan ruang lingkup nasional dan regional secara regular kepada pers. Siaran pers meliputi informasi kinerja Perseroan, sosialisasi program pemasaran, penandatanganan kerjasama dengan pihak lain dan kegiatan sosial (*Corporate Social Responsibility* - CSR).

Press Release

Throughout 2016, the Company has published regular press releases with national and regional scope. Press releases include information about the Company's performance, socialization of marketing programs, signing cooperation with other parties and social events (*Corporate Social Responsibility* - CSR).

No.	Date of Publication	Title	Media
1	1-Jan-16	Tak Hanya Bisnis, Tapi Juga Solusi <i>Not Just Business, But Also Solutions</i>	Marketeers
2	6-Jan-16	Adi Sarana tambah 2.500 armada baru tahun ini <i>Adi Sarana added 2,500 new fleet this year</i>	Kontan.co.id
3	6-Jan-16	ASSA targetkan penjualan tumbuh 25% <i>ASSA targeting sales grow 25%</i>	Kontan.co.id
4	7-Jan-16	ASSA Akan Tambah 2000-2500 Armada <i>ASSA Will Add 2000-2500 Fleet</i>	Kontan
5	7-Jan-16	SEWA MOBIL: ASSA Targetkan Pendapatan Naik 25 Persen <i>CAR RENTAL: ASSA Targets 25 Percent Revenue Growth</i>	Bisnis.com
6	11-Jan-16	Boleh Saja Bekas, tapi Bisa Tumbuh Trengginas <i>It's Okay Secondhand, but Can Grow Agile</i>	Kontan tabloid
7	18-Jan-16	ASSA akan Tambah 4000-45000 Armada Baru <i>ASSA will Add 4000-45000 New Fleet</i>	Bisnis.com
8	19-Jan-16	ASSA akan Tambah 4000-45000 Armada Baru <i>ASSA will Add 4000-45000 New Fleet</i>	Bisnis Indonesia
9	25-Jan-16	Adi Sarana Siapkan Capex Rp 1 triliun <i>Adi Sarana Prepares Capex of Rp 1 trillion</i>	beritasatu.com
10	26-Jan-16		Investor Daily
11	26-Jan-16	Adi Sarana Siapkan Capex Rp 1 Triliun <i>Adi Sarana Prepares Capex of Rp 1 Trillion</i>	Okezone
12	17-Feb-16	Taksi Online Belum Usik Eksistensi Bisnis Rental <i>Online Taxi has not disturbed Rental Business Existence</i>	tribunnews.com
13	21-Feb-16	Hari Peduli Sampah Nasional 2016 <i>National Trash Care Day 2016</i>	Net TV
14	22-Feb-16	ASSA Rent Adakan Aksi Sosial Peduli Sampah <i>ASSA Rent Holds Trash Care Social Action</i>	beritasatu.com
15	1-Mar-16	Layanan Berkualitas dan Tim Hebat <i>Quality Service and Great Team</i>	SWA

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

No.	Date of Publication	Title	Media
16	29-Mar-16	ASSA Rent Bagikan 10.000 Buku Bacaan ASSA Rent gives out 10,000 books	Koran Sindo
17	29-Mar-16	ASSA Rent Salurkan Buku & Alat Tulis ASSA Rent Distributes Books & Stationery	Batam Pos
18	29-Mar-16	ASSA Rent Sumbangkan Buku ke Sekolah ASSA Rent Donates Books to Schools	Tribun Batam
19	1 to April 16	Profil Investasi Prodjo Sunarjanto Investment Profile of Prodjo Sunarjanto	SWA
20	11-April 2016		IDX Chanel
21	May 3, 2016	Gerakan 10 Ribu Buku dari Assa Rent untuk SD di Bintan from Movement of 10 Thousand Books of Assa Rent for elementary schools in Bintan	tribunnews.com
22	May 9, 2016	Dikabarkan Diakuisisi Northstar, Saham ASSA Melonjak, Sinergi dengan Go-Jek? Reported Acquired by Northstar, ASSA Shares soar. Synergies with Go-Jek?	bareksa.com
23	May 10, 2016	ASSA Jajaki Kerja Sama Dengan Gojek ASSA Explores Cooperation with Gojek	bisnis.com
24	May 10, 2016	ASSA dan Go-Jek Akan Jalin Kerja Sama, Bagaimana Bentuknya? ASSA and Go-Jek Will Establish Cooperation, What is the Form?	bareksa.com
25	May 11, 2016	ASSA Pangkas Target Pendapatan ASSA Cuts Revenue Target	bisnis.com
26	May 18, 2016	ASSA Rent Mengincar Armada Go-car Assa Rent Targets Go-car fleet	Kontan
27	May 19, 2016	ASSA Rent Mengincar Armada Go-car Assa Rent Targets Go-car fleet	Kontan.co.id
28	June 1st, 2016	Cara Cepat dan Aman Jual Kendaraan How to Quickly and Safely Selling Vehicles	autobild.co.id
29	June 6th, 2016	ASSA Bidik Pertumbuhan di Atas 10% ASSA Aims Growth Above 10%	bisnis.com
30	June 6th, 2016	ASSA Jajaki Kerjasama dengan Uber ASSA Explores Cooperation with Uber	bisnis.com
31	June 6th, 2016	ASSA Tambah 1.000 Armada ASSA Adds 1,000 Fleet	bisnis.com
32	June 6th, 2016	ASSA Rent Kecipratan Rejeki Uber ASSA Rent Splashed by Uber Fortune	kontan.co.id
33	June 7th, 2016	ASSA Panen Rental Mobil Jelang Lebaran ASSA Harvests Car Rental Approaching Lebaran	kontan.co.id
34	June 7th, 2016	Adi Sarana Masih Kaji Kerja Sama dengan Gojek Adi Sarana Still Assesses Cooperation with Gojek	beritasatu.com
35	June 7th, 2016	Assa Rent ikut Menguber Pendapatan dari Uber Assa Rent Joins Chasing Income from Uber	tribunnews.com
36	June 7th, 2016	ASSA Panen Rental Mobil Jelang Lebaran ASSA Harvests Car Rental Approaching Lebaran	Bisnis Indonesia
37	June 7th, 2016	ASSA Jajaki Aliansi dengan Uber & Gojek ASSA Explores Alliance with Uber & Gojek	Kontan
38	June 7th, 2016	ASSA dapat Bisnis dari Uber, Sahamnya Masih Sideways ASSA gets Businesses from Uber, Its Shares Are Still Sideways	vibiznews.com
39	June 8th, 2016	Indonesia Car Rental Adi Sarana Gets Partnership Offers from Gojek, Uber, Grab Indonesia Car Rental Adi Sarana Gets Partnership Offers from Gojek, Uber, Grab	dealstreetasia.com

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

No.	Date of Publication	Title	Media
40	June 10, 2016	2015, ASSA Raup Laba Bersih Rp34.17 Miliar 2015, ASSA Earned Rp34.17 billion of Net Income	infobanknews.com
41	14 Juni 2016	Adi Sarana Genjot Bisnis Lelang Adi Sarana Boosts Auction Business	Bisnis.com
42	July 13th, 2016	ASSA Serap Belanja Modal 40% ASSA Absorbs 40% Capital Expenditure	Bisnis.com
43	July 13 016	Adi Sarana Armada (ASSA) Kantongi Pinjaman Rp200 Miliar Adi Sarana Armada (ASSA) Receives Rp200 Billion Loan	Bisnis.com
44	July 13th, 2016	Adi Sarana Armada Raih Kredit Rp200 M Adi Sarana Armada Obtains Credit of 200 Billion	inilah.com
45	July 13th, 2016	ASSA Dapat Pinjaman Perbankan Rp 200 Miliar ASSA Receives Banking Loan of Rp 200 Billion	Kontan.co.id
46	July 13th, 2016	ASSA Berhutang 200 Miliar Untuk Tambah Armada ASSA Owes 200 Billion To Add Fleet	vibiznews.com
47	July 13th, 2016	Adi Sarana Armada Raih Kredit Rp200 M Adi Sarana Armada Obtains Credit of 200 Billion	inilah.com
48	July 14, 2016	Adi Sarana Kantungi Pinjaman Rp 200 Miliar Adi Sarana Receives Loan of Rp 200 Billion	
49	July 14, 2016	Adi Sarana Armada Perluas Area Bisnis Lelang Adi Sarana Armada Expands Auction Business Area	Kontan.co.id
50	July 14, 2016	AKSI ASSA: Adi Sarana Genjot Bisnis Lelang ASSA ACTION: Adi Sarana Boosts Auction Business	Bisnis.com
51	July 14, 2016	ASSA Cari Pinjaman Rp 400 Miliar ASSA seeks Rp 400 Billion Loan	Bisnis Indonesia
52	July 14, 2016	Adi Sarana Raih Pinjaman Rp200 M Adi Sarana Obtains Loan of 200 Billion	Investor Daily
53	July 15th, 2016	Adi Sarana Armada Perluas Area Bisnis Lelang Adi Sarana Armada Expands Auction Business Area	Kontan.co.id
54	July 15th, 2016	TOP GAINERS 15 JULI: Saham Adi Sarana Armada Meroket 34,68% TOP GAINERS JULY 15: Adi Sarana Armada shares skyrockets 34.68%	Bisnis.com
55	July 15th, 2016	INDEKS BEI 15 JULI: TLKM Pendorong Utama, Saham ASSA Naik Paling Tajam BEI INDEX JULY 15: TLKM Top Pusher, ASSA Stocks Rises Most Sharply	Bisnis.com
56	July 15th, 2016	ASSA Siap Tambah Tiga Gerai Lelang ASSA Is Ready to Add Three Auction Outlets	Kontan
57	August 3rd, 2016	Siasat Investor Kakap Kala IHSG Mengkilap Bid Investors' finesse When JCI Shines	Kontan.co.id
58	August 1st, 2016	Denyut Sektoral IHSG : Sektor Infrastruktur Melompat 4 Persen, Saham ASSA Penopang JCI Sectoral pulse: Infrastructure Sector Jumps 4 Percent, ASSA Shares Supports	vibiznews.com
59	August 5th, 2016	Meski Kondisi Keuangan ASSA Mantap, Sahamnya Masuk UMA Although ASSA Financial Condition IsSteady, Its Shares Included in UMA	vibiznews.com
60	August 6th, 2016	ASSA Dapat Kredit Rp200 Miliar Dari Bank Sumitomo Mitsui ASSA Received Rp200 Billion Loan From Bank Sumitomo Mitsui	infobanknews.com

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

No.	Date of Publication	Title	Media
61	16 August 2016	ASSA Siap Tambah Armada untuk Taksi Online <i>ASSA Is Ready to Add Fleet for Taxi Online</i>	Bisnis.com
62	August 24, 2016	Adi Sarana Kembali Menggeliat <i>Adi Sarana Stretches Back</i>	investor Daily
63	August 24, 2016	Adi Sarana Kembali Menggeliat <i>Adi Sarana Stretches Back</i>	beritasatu.com
64	August 26, 2016	Asa ASSA dari Mobkas dan Taksi Online <i>Asa ASSA from Mobkas and Taxi Online</i>	Bisnis Indonesia
65	August 26, 2016	Asa ASSA dari Mobkas dan Taksi Online <i>Asa ASSA from Mobkas and Taxi Online</i>	Bisnis.com
66	October 14, 2016	Perusahaan Rental Mobil Bidik Korporasi <i>Car Rental Company Aims Corporations</i>	Suara Merdeka
67	October 15, 2016	Perusahaan Rental Mobil Bidik Korporasi <i>Car Rental Company Aims Corporations</i>	Suaramerdeka.com
68	8 November 2016	Adi Sarana siap tambah 300 armada baru <i>Adi Sarana is ready to add 300 new fleet</i>	Kontan.co.id
69	8 November 2016	Genapi 1.000 Unit, Adi Sarana Akan Tambah 300 Armada Baru <i>Achieving 1,000 units, Adi Sarana Will Add 300 New Fleet</i>	tribunnews.com
70	9 November 2016	Demi Tambah Kendaraan, ASSA Jajaki Kredit Rp 400 M <i>In Order to Add Vehicle, ASSA Explores credit of Rp 400 Billion</i>	Kontan
71	9 November 2016	ASSA Bakal Tambah 1.000 Armada Baru <i>ASSA Will Add 1,000 New Fleet</i>	Bisnis.com
72	9 November 2016	KINERJA KUARTAL III/2016: Adi Sarana Armada (ASSA) Raup Pendapatan Rp1,13 Triliun <i>QUARTER III/2016 PERFORMANCE: Adi Sarana Armada (ASSA) Achieves Rp1.13 Trillion Revenue</i>	Bisnis.com
73	14 November 2016	Mengais Cuan Saat Bursa Melemah <i>Reaping Profits Amid The Sluggish Stock Exchange</i>	Kontan
74	14 November 2016	Reaping Profits Amid The Sluggish Stock Exchange <i>Reaping Profits Amid The Sluggish Stock Exchange</i>	Kontan.co.id

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) kepada pemangku kepentingan bahwa semua sistem, prosedur, kaidah dan norma telah dilakukan oleh semua organ dalam lingkup Perseroan dijalankan dengan benar. Pengendalian yang efektif akan meningkatkan keterandalan dari informasi keuangan, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan operasional Perseroan, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Fungsi pengendalian internal dapat mengarahkan Perseroan untuk mencapai *Good Corporate Governance*(GCG), yaitu diwujudkan dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Kewajaran & Kesetaraan (TARIF).

Sistem Pengendalian Internal merupakan tanggung jawab dari manajemen dan diawasi oleh UAI. Bentuk pengawasan pengendalian internal yang dilakukan UAI adalah melakukan pengawasan secara langsung dengan melaksanakan audit atas unit kerja yang dipilih berdasarkan konsep audit yang berkesinambungan dengan:

- Menjaga dan mengamankan aset Perseroan
- Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- Mengurangi dampak keuangan, penyimpangan, kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran
- Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Selain itu, Sistem Pengendalian Internal juga berfungsi sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku dengan tujuan;

- Menjamin bahwa semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawas maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Perseroan.
- Menyediakan laporan yang benar, lengkap, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perseroan dari risiko kerugian.
- Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di dalam Perseroan secara berkesinambungan.

Internal Control System aims to provide assurance to stakeholders that all systems, procedures, rules and norms have been properly conducted by all organs within the scope of the Company. Effective control will improve the reliability of financial information, efficiency, and effectiveness of Company's operations, and compliance with applicable laws and regulations. Internal control function can lead the Company to achieve Good Corporate Governance (GCG), which is realized with the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness & Equality (TARIF).

Internal Control Systems is the responsibility of management and monitored by the UAI. Forms of internal control supervision by UAI is to directly supervise by carrying out an audit of work units selected based on the concept of continuous auditing to:

- Maintain and secure Company assets
- Ensure availability of more accurate reports
- Improve compliance with applicable regulations
- Reduce financial impact, irregularities, fraud, and violations
- Enhance organizational effectiveness and improve cost efficiency.

In addition, the Internal Control System also serves as compliance with applicable rules and regulations with the following objectives;

- Ensure that all business activities have been carried out in accordance with the applicable rules and regulations, both regulations issued by the government, monitoring and policy authorities, provision and internal procedures set by the Company.
- Provide correct, complete and timely reports in the context of performing relevant and accountable decision-making.
- Improve effectiveness and efficiency in the use of assets and other resources in order to protect the Company from risk of losses.
- Identify weaknesses and assess early deviations and to re-assess fairness of Company's policies and procedures on an ongoing basis.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah menerapkan standar COSO (*Committee of Sponsoring Organization on Treadway Commission*). Pengendalian Internal dalam lingkup Perseroan dijalankan dengan benar, sehingga mengarahkan Perseroan untuk mencapai *Good Corporate Governance* (GCG), yang diwujudkan dengan prinsip *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* (TARIF).

Secara umum, pengendalian internal telah dijalankan oleh UAI sesuai dengan perintah dari Presiden Direktur dengan scope audit berbasis keuangan, operasional, kepatuhan, dan Risiko. Dalam melakukan audit, di samping diperolehnya kecukupan data, informasi dan bukti tertulis, juga ditelaah informasi yang tidak tertulis namun dalam operasional diterima sebagai suatu aturan, sehingga meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dilanggar oleh organ dalam perusahaan, maka perlu dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit yang berlaku secara umum.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Efektivitas Pengendalian Internal mengacu pada penerapan lima elemen utama yang berkaitan satu sama lain, yaitu

- Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian,
- Identifikasi dan penilaian risiko,
- Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi,
- Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi, serta
- Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan.

Pada hakekatnya dalam sistem pengendalian internal dinyatakan bahwa semua ketentuan dan aturan yang berlaku dijalankan dengan benar. Pengendalian intern dalam lingkup Perusahaan bertujuan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Top Manajemen bahwa semua sistem, prosedur, kaidah dan norma yang seharusnya dilakukan oleh semua organ dalam lingkup Perusahaan dijalankan dengan benar, sehingga dengan pengendalian yang efektif akan tercipta suatu *Good Corporate Governance* (GCG) yang sehat dan sejalan dengan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan Keadilan (TARIF).

Internal Control System Framework

The Company's Internal Control System has implemented the COSO (Committee of Sponsoring Organization on Treadway Commission) standard. Internal control within the scope of the Company is executed correctly, thus directing the Company to achieve good corporate governance (GCG), which is realized with the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, independency and Fairness (TARIF).

In general, the internal control has been conducted by the UAI in accordance with the orders of President Director with the scope of financial-based audit, operational, compliance, and Risk. In conducting the audit, in addition to obtaining adequacy of data, information and documentary evidence, the information that is not written yet is accepted in operation as rule is also examined, so as to ensure that the internal control system has not been violated by the organs of the company, it needs to be tested in accordance with the standards specified in the applicable audit implementation.

Effectiveness of Internal Control System

Effectiveness of Internal Control refers to the application of five major elements which are related to one another, namely

- Supervision by the management and control culture,
- Risk identification and assessment,
- Control activity and separation of functions,
- Accounting, information and communication systems, and
- Monitoring and deviation/weakness corrective action.

In essence, the internal control system states that all applicable rules and regulations are properly conducted. Internal control within the Company aims to provide assurance to the Top Management that all systems, procedures, rules and norms that should be done by all organs within the scope of the Company are run properly, hence the effective control will create healthy Good Corporate Governance (GCG) and in line with the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness (TARIF).

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal dimulai dari ditemukannya kondisi yang tidak sesuai dalam melakukan audit pada unit kerja yang telah ditentukan, jika hasil kajian audit ditemukan adanya aspek pengendalian internal yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam Laporan kepada Presiden Direktur disampaikan aspek-aspek pengendalian yang tidak berjalan dan alasan mengapa tidak berjalan dengan baik. Presiden Direktur memberikan arahan tindak lanjut bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal yang belum berjalan dapat ditaati. Hal itu menjadi peringatan (*warning*) bagi Manajemen untuk melakukan pengendalian secara intens dalam lingkup tanggungjawabnya untuk melakukan evaluasi dan pencegahan temuan UAI agar tidak terjadi pada kegiatan yang lain.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Manajemen Departemen, rekomendasi UAI ditindaklanjuti oleh unit kerja dan UAI turut serta memonitor tindak lanjut rekomendasi seluruh *auditee*. Pada akhir tahun buku, UAI memberikan laporan tahunan kepada Direksi terkait dengan hasil pelaksanaan audit dan implementasi Sistem Pengendalian Internal.

Selain itu secara periodik UAI melakukan koordinasi dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan audit UAI, memberikan *feed back* pada beberapa unit kerja bersama UAI, dan melakukan *site visit* untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah dijalankan oleh unit kerja. Komite Audit melakukan pemilihan unit kerja pada kegiatan yang berisiko tinggi, *progress* terlambat, permasalahan piutang atau terjadi penyimpangan kinerja.

Unit Audit Internal

Audit Internal berfungsi membantu Presiden Direktur dalam pengawasan dan pengendalian dan dilaksanakan oleh Unit Audit Internal (UAI). Kepala SPI sejak 2012 adalah Reny Yulistina Anggoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor. 005/SKEP/BOD/ASA/XI/2012 tanggal 8 November 2012.

The analysis on the effectiveness of internal control system is started from the finding of inappropriate conditions during the audit of selected working units, if the audit review found that there are internal control aspect not in accordance with applicable regulations, then in Report to the President Director such control aspects will be revealed and the reason why they did not run well. President Director gives follow up direction on how to run proper internal control system. It is a warning for management to perform an intense control within the scope of their responsibilities and make evaluation and prevention of UAI findings so they will not occur in other activities.

As a form of responsibility of Department Management, UAI recommendations are acted upon by the working units and UAI participates in follow-up monitoring of recommendations of all auditees. At the end of the fiscal year, UAI provides an annual report to the Board of Directors related to the results of the audit and Internal Control System implementation.

Besides that, periodically UAI makes coordination with the Audit Committee to evaluate the results of the UAI audit, gives feed back to several working units together with UAI, and conducts site visit to ensure that internal controls have been implemented by the unit. The Audit Committee selects work unit of high-risk activities, late progress, receivables problems or performance irregularities.

Internal Audit Unit

Internal Audit helps President Director in the supervision and control and is carried out by the Internal Audit Unit (UAI). Head of Internal Audit since 2012 is Reny Yulistina Anggoro appointed by Decree of the Board of Directors Number.005/SKEP/BOD/ASA/XI/2012 dated November 8, 2012.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Profil Kepala Audit Internal

Reny Yulistina Anggoro

Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Menjabat sebagai Ketua Audit Internal ASSA sejak bulan Juni 2012. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1999 dan Qualified Internal Audit dari Yayasan Pendidikan Internal Audit pada tahun 2005. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Internal Audit PT Astra Otoparts Tbk (2006-2012), Risk Management Fasilitator PT Astra Otoparts Tbk (2003-2005). Business Process Improvement & SOP Analyst PT Astra Otoparts Tbk (1999-2002).

Komposisi dan Kualifikasi Satuan Pengawasan Intern

Jumlah UAI pada tahun 2016 adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari:



Reny Yulistina Anggoro, SE, QIA

Qualified Internal Audit

Valentine Laura Thennos, SE

Internal Audit

Basyar Tri Akbar, SE

Internal Audit

Aloysius Ari Prasetya Abadi, SE

Internal Audit

Rika Juliana, SE

Internal Audit

Head of Internal Audit Unit Profile

Reny Yulistina Anggoro

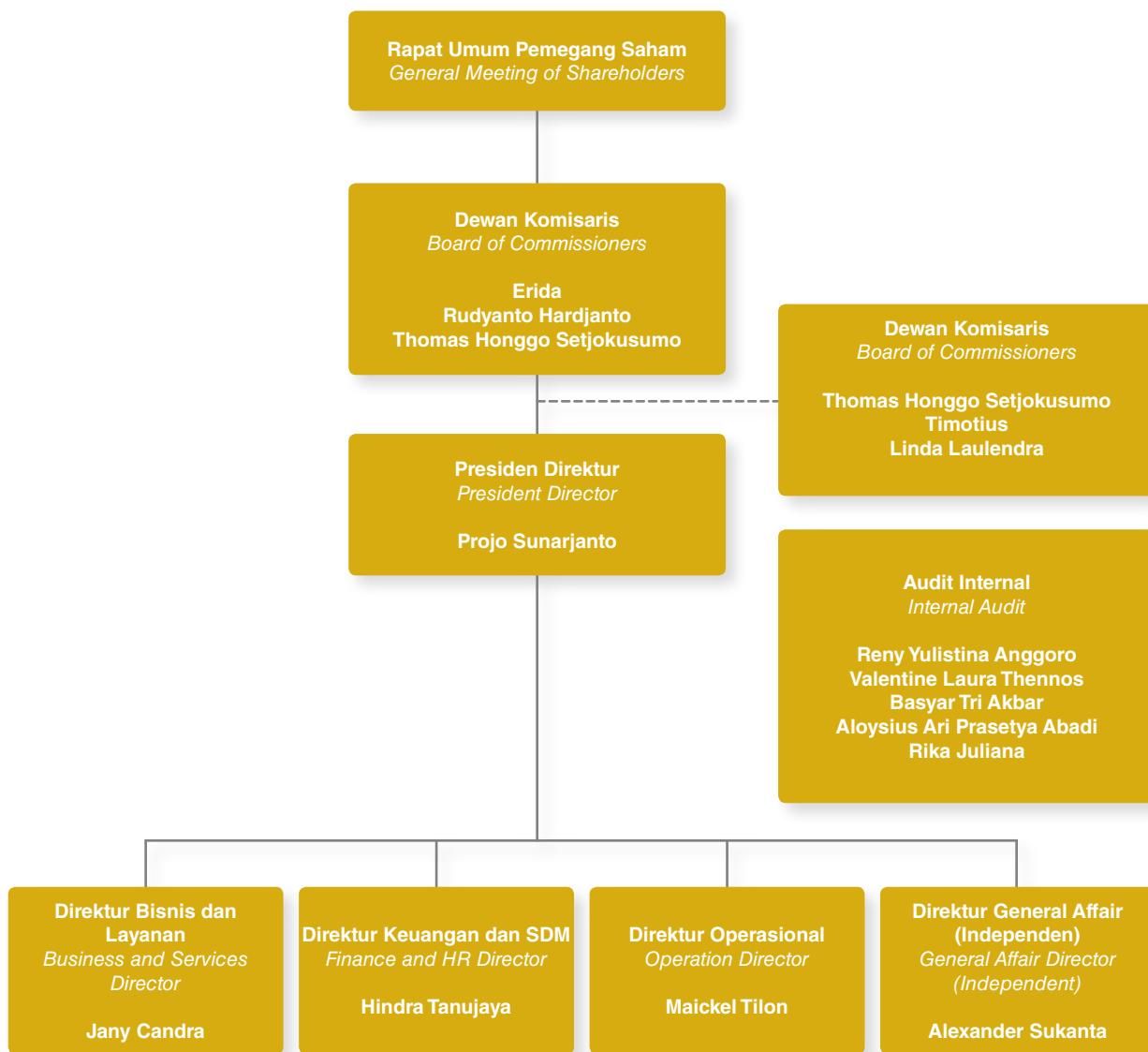
Indonesian citizen, 37 years. She has been serving as Head of the Internal Audit of ASSA since June 2012. She holds a Bachelor of Economics majoring in Accounting from the University of Atma Jaya Yogyakarta FakultasEkonomi in 1999 and Qualifid Internal Audit of Internal Audit Education Foundation in 2005. Previously, he served as Coordinator of Internal Audit PT Astra Otoparts (2006-2012), Risk Management facilitator Astra Otoparts (2003-2005). Bussiness Process Improvement & SOP Analyst Astra Otoparts (1999-2002).

Composition and Qualification of Internal Control Unit

Number of UAI in 2016 was 5 people consisting of:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM



Pelaksanaan Tugas SPI

Sepanjang tahun 2016, Unit Audit Internal telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dengan detail sebagai berikut:

1. Menyusun dan merencanakan program kerja khususnya program pengendalian internal
2. Melakukan pengujian dan evaluasi terhadap program yang telah terlaksana sesuai dengan kebijakan Perseroan

Performance of Duties of Internal Audit Unit

Throughout 2016, the Internal Audit Unit has performed various activities related to its duties and authorities with details as follows:

1. Develop working program especially the internal control program.
2. Perform examination and evaluation on programs that have been implemented in accordance with the Company's policy.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

3. Melakukan pemeriksaan dan Penilaian atas eksistensi dan efektivitas dalam bidang keuangan, akutansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
7. Bekerja sama dengan komite audit
8. Menyusun program dan mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
3. Examine and evaluate the existence and effectiveness of finance, accounting, operations, information technology and other activities.
4. Provide improvement recommendations and objective information regarding activity audited in every management level.
5. Prepare audit result report and deliver the report to the President Director and the Board of Commissioners.
6. Oversee, analyze and report implementation of recommended follow-up improvement.
7. Cooperate with Audit Committee.
8. Prepare program and evaluate quality of internal audit.
9. Perform special audit if necessary.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Unit Audit Internal melakukan audit secara internal dan bekerjasama dengan Komite Audit dan Akuntan Publik. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab pada Presiden Direktur.

Authority Who Appoints/Dismisses Head of Internal Audit Unit

Internal Audit Unit performs internal audit in cooperation with Audit Committee and Public Accountant. Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed, and is responsible to the President Director.

Akuntan Publik

Public Accountant

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) diputuskan melalui RUPST tanggal 6 Juni 2016 untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2016. KAP Purwantono Sungkoro & Surja & Rekan telah melakukan audit terhadap Perseroan sebanyak 5 kali sejak tahun 2011, dengan biaya di tahun 2016 sebesar Rp 880 juta.

Dalam juta Rupiah

Tahun Year	Nama KAP <i>Name of Public Accountant</i>	Mitra Partner	Biaya Fee (Rp)
2012	Purwantono Suherman & Surja	Ratnawati Setiadi	1,520
2013	Purwantono Suherman & Surja	Ratnawati Setiadi	525
2014	Purwantono Suherman & Surja	Hermawan Setiadi	744
2015	Purwantono Sungkoro & Surja	Widya Arijanti	820
2016	Purwantono Sungkoro & Surja	Daniel S Handaya	880

Tidak ada jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik selain jasa audit laporan keuangan Perseroan.

Opini KAP

Berdasarkan opini KAP, bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian ASSA dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The appointment of Public Accountant Firm (KAP) was decided through the Annual General Meeting of Shareholders dated June 6, 2016 to audit Financial Statements for Fiscal Year 2016. Public Accountant Firm of Purwantono Sungkoro & Surja & Partners has performed audit on the Company for 4 times since 2011 at the cost in 2016 of Rp743.5 million.

In million Rupiah

Public Accountant did not offer services other than financial statements audit of the Company.

Opinion from Public Accountant Firm

Based on the opinion from Public Accountant Firm, the attached consolidated financial statements has fairly presented all material respects, consolidated financial position of ASSA and its subsidiaries on December 31, 2014, as well as the financial performance and consolidated cash flows for year ended on the said date has been in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen Resiko adalah proses pengendalian, mitigasi atas risiko dan strategi untuk menghindari risiko, mengurangi efek negatif dari risiko dan dapat menampung atas konsekuensi risiko tertentu.

ASSA sebagai perusahaan penyedia layanan penyewaan kendaraan di Indonesia secara berkesinambungan dan terintegrasi melakukan pengelolaan dan penyesuaian dalam proses dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan perkembangan terkini. Pengelolaan tersebut diantaranya dengan melaksanakan Manajemen risiko yang sistematis, meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pengungkapan risiko.

Perusahaan juga memiliki komitmen untuk mengungkapkan risiko-risiko yang relevan dan secara signifikan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Namun demikian, ASSA juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi, evaluasi serta pengendalian risiko dari setiap aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kelangsungan usaha. Manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan risiko usaha, terlebih ASSA sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil korporasi tentunya tidak lepas dari sederet risiko usaha, baik yang ditimbulkan karena aktivitas internal maupun eksternal. Manajemen risiko mengajak ASSA untuk memberikan kecukupan control dari setiap aktivitas yang terjadi didalamnya.

Kebijakan Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar pengelolaan risiko untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional Perusahaan. Prosedur Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan yang memberikan penjelasan detail proses pengelolaan risiko Perusahaan. Proses pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan dengan menggunakan pola pengelolaan risiko di seluruh unit kerja, serta pengelolaan risiko terkait dengan isu-isu strategis dan operasional. Evaluasi dan *monitoring* atas penerapan

Risk Management is a mitigation of certain risk and a strategy to prevent risk, reduce negative impact of risk and to accommodate certain risk consequences.

ASSA, as a vehicle lease service provider in Indonesia, performs management and adjustment of risk management process and procedure to conform to current trend in a continuous and integrated manner. The management is conducted namely by implementing systematic Risk Management, including risk identification, risk assessment, risk mitigation and risk disclosure.

The Company is also committed to disclose relevant risk which may significantly affect the Company's value. In this regard, ASSA is also aware that there are certain uncontrollable risks that cannot be fully mitigated by internal initiatives.

Risk Management Policy

Risk Management is a process in managing risk including risk identification, evaluation and mitigation from every activity in the Company which may threat business sustainability. The risk management has important role in preventing business risk, especially ASSA as a Company which is operated on corporate car rental which cannot be separated from series of risks both due to internal and external activities. Risk Management invites ASSA to provide control adequacy from every activity occurred inside the cycle.

Risk Management Policy is applied as foundation of risk management to take strategic and operational decision in the Company. Risk Management Implementation procedure is an advance explanation from Risk Management policy of the Company which provides comprehensive explanation regarding risk management process in the Company. Risk Management process in the Company is carried using risk mitigation scheme in all working units (business process owner) and the risk management is related with strategic and operational issue. Evaluation and Monitoring of risk

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

manajemen risiko tersebut secara periodik dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan menajemen risiko.

Unit Kerja Manajemen Risiko Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG yang efektif, Perusahaan telah membentuk unit kerja manajemen risiko yang bertanggungjawab mengkoordinir, mengevaluasi, dan memfasilitasi kegiatan pengelolaan risiko di Perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko tercapai secara komprehensif, efektif, dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Perusahaan.

Salah satu implementasi prinsip GCG adalah penerapan Manajemen Risiko yang menyeluruh (*Enterprise-Wide Risk Management*). Penerapan manajemen risiko oleh Perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan melakukan mitigasi risiko.

Profil Risiko dan Mitigasinya

Berdasarkan bidang usaha serta kegiatan operasional Perseroan, profil risiko yang dihadapi ASSA selama tahun 2016, sebagai berikut:

- Risiko Pendanaan
Upaya untuk mengatasi risiko ini adalah dengan memastikan ketersediaan dana yang dibutuhkan dan mengendalikan setiap jatuh tempo pinjaman pendanaan.
- Risiko Fluktuasi Suku Bunga
Perseroan mengatur porsi pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap dan mengurangi porsi pinjaman dengan tingkat suku bunga yang fleksibel. Sementara untuk kontrak sewa dengan *customer*, ASSA menerapkan kontrak yang lebih fleksibel dimana ketentuan kontrak termasuk nilai kontrak dapat disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- Risiko Kredit
Perseroan melakukan kontrol dengan melakukan seleksi yang ketat terhadap pemilihan *customer*, adanya klausul pinjaman dalam kontrak. Disamping itu juga ASSA secara rutin melakukan riset pasar dan survei kepuasan

management implementation is carried periodically to ensure adequacy of risk management implementation scheme and effectiveness on the Risk Management unit.

As a commitment of the Company in implementing effective GCG, the Company has established risk management unit which is in charge in coordinating, evaluating and facilitating risk management activity in the Company. This is carried to ensure that the risk management implementation can be achieved comprehensively, effectively and efficiently based on the plan determined by the Company.

One of GCG principles implementation is Enterprise-wide Risk Management implementation. The risk management implementation by the Company is aimed to identify, assess and perform risk mitigation.

Risk Profile and Risk Mitigation

Based on business line and operational activity of the Company, risk profile experienced by ASSA in 2014 are as follows:

- Financing Risk
The effort to mitigate this risk is by ensuring the availability of required fund and to control activity in every loan maturity.
- Interest Rate Fluctuation Risk
The Company manages loan portion with fixed interest rate and renews loan with flexible interest rate. While, for leasing contract with the customers, ASSA applies more flexible contract where the contract provision is including contract value can be adjusted with applicable interest rate.
- Credit Risk
The Company carries initial control by performing tight selection on the customer selection process, applying penalty clause on the contract. Moreover, ASSA also carries Market research and customer satisfaction survey

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

customer dalam upaya untuk penetapan biaya jasa yang tepat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan karakteristik masing-masing *customer*.

- Risiko Proses

ASSA menetapkan kebijakan bahwa setiap unit kendaraan dilindungi oleh Asuransi yang komprehensif pada Perusahaan Asuransi yang bereputasi baik untuk menanggulangi berbagai risiko yang mungkin terjadi, dimulai dari pertanggungan atas risiko kerusakan kendaraan, dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh akibat dari dan atau ditimbulkan oleh kejadian yang tidak terduga (*force majeure*).

- Risiko SDM

Dalam pengelolaan SDM, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan *enrichment knowledge* kepada para karyawannya dengan *coaching*, *Mentoring* dan *training* dari tingkat staf sampai *top management*. Salah satu contoh upaya pengelolaan tersebut adalah dengan adanya program bank mekanik yang dilakukan secara rutin untuk pengembangan dan peningkatan kualitas mekanik. Selain itu untuk menjaga loyalitas dan kepuasan karyawan, Perseroan menetapkan program *reward* yang kompetitif baik dari segi gaji, tunjangan penghargaan dan tantangan pekerjaan.

- Risiko Sistem

Perseroan menyadari bahwa dukungan sistem IT sangatlah penting untuk mendukung dan menunjang jalanya aktivitas bisnis, sesuai dengan perencanaan pada tahun 2014 Perseroan melakukan peningkatan sistem ERP dengan penerapan SAP agar semua data dapat terintegrasi dengan data terkini sehingga laporan dapat diproses lebih cepat dan akurat serta dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada *customer*. Selain itu, dengan implementasi SAP diharapkan dapat mendukung kemudahan pengembangan bisnis yang akan datang.

- Risiko K3L

Dari segi Keselamatan kerja, Perseroan mewajibkan karyawan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri

periodically to determine accurate service charge based on each customer characteristic.

- Process Risk

ASSA determines a policy that every vehicle is protected by a comprehensive insurance by reputable Insurance Company to mitigate various risk which may occur starting from coverage from vehicle disruption, and/or legal responsibility of third party which directly or indirectly occurred due to or caused by unexpected occurrence (*force majeure*).

- HR Risk

In human resource management, the Company continues to improve the quality and competence of human resources through knowledge enrichment to employees with coaching. Mentoring and training are conducted starting from staff to top level management. An example of such management effort is the establishment of mechanical bank program conducted periodically for development and enhancement of mechanical quality. Besides, to maintain loyalty and satisfaction of employees. The Company determines reward program which is highly competitive either from salary, benefit reward or job challenge aspects.

- System Risk

The company recognizes that IT system support is highly important to support business activities and supporting nets, according to the plan in 2014, the Company improved its ERP system under the SAP implementation so that all data can be integrated with current data that the reports will be created faster and accurate, and expected to be responsive in providing services to customers. In addition it is expected that the implementation of SAP to support the development of Company's business in years to come.

- HSE Risk

In terms of Work safety, the Company requires the employees to use Personal Protective Equipment

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

(APD) pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan. Penggunaan APD selain untuk menjaga keselamatan kerja karyawan juga untuk meminimalisasi dampak penyakit akibat kerja yang mungkin dapat ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan. Pemeriksaan kesehatan juga secara berkala dilakukan.

Sedangkan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungannya, Perseroan berupaya untuk melakukan identifikasi terhadap limbah yang dihasilkan di setiap aktivitas yang dilakukan serta mengendalikan proses pembuangan atas limbah tersebut. Pemasangan *Oil trap* dan *Waste Water Treatment Plan* (WWTP) dilakukan dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap lingkungan secara rutin dilakukan guna memastikan bahwa baku mutu air imbah tidak melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

- Risiko Pasar Mobil

Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan melakukan atau mengolah riset pasar secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengantisipasi risiko tersebut terutama dalam menentukan nilai dan ketentuan kontrak dengan *customer* dan jadwal akuisisi mobil baru dan penjualan mobil bekas. Risiko tersebut juga dikelola dengan diversifikasi portofolio unit kendaraan yang merupakan merk dan jenis populer sehingga mudah dijual pada saat masa ekonomis kendaraan tersebut habis.

- Risiko Pemutusan dan Tidak Diperpanjangnya Kontrak

Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan mengembangkan solusi transportasi terintegrasi dengan selalu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan para *customer*-nya, serta melakukan riset pasar dan survei kepuasan *customer* sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan penetapan biaya jasa yang tepat kepada tiap-tiap *customer* sesuai dengan karakteristik *customer* masing-masing sehingga Perseroan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga pesaing sejenis akan sulit untuk masuk. Risiko tersebut juga dimitigasi oleh Perseroan dengan adanya klausul pinalti dalam kontrak apabila *customer* melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Perseroan sebelum masa kontrak berakhir.

(APD) when conducting specified activities. In addition to ensure safety of employees, the use of APD is also being implemented to minimize occupational illness that may occur during work activities. Health examination is also conducted in a regular basis.

Meanwhile, as a manifestation of concern for the environment, the Company sought to conduct identification on waste generated from all activities and to control waste disposal process. Oil trap and Waste Water Treatment Plan (WWTP) was installed as an effort to preserve natural resources. Monitoring and examination of environment is performed routinely in order to ensure that the wastewater quality standard does not exceed the quality standards set by the local government.

- Car Market Risk

The Company manages this risk by performing or processing market research on an ongoing basis in the expectation of anticipating the risk especially in determining the value and terms of contract with customer and determining acquisition schedule of new car and used car sales. The risk is also managed through portfolio diversification of vehicle units with popular brand and types so that it would be easier to sell when the economic period of the said vehicle expired.

- Contract Termination Risk

The Company manages this risk by developing solution for integrated transportation by continuously establishing relationship and a good & sustainable communication with its customers, as well as performing market research and customer satisfaction survey so that the Company can give the best services and set an appropriate cost for services for each customer with their own characteristics with an aim for the Company to give a qualified services so that it would be hard for similar competitors to compete in the business. The risk can also be mitigated by the Company by implementing penalty clause in the contract if customer terminates its working contract with the Company before the contract expires.

- Risiko Ketergantungan pada Tenaga Kerja Berkualitas
Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan mengimplementasikan program kerja pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan antara lain melalui program penerimaan karyawan baru yang selektif, penerapan SOP (*Standard Operational Procedure*), program motivasi karyawan termasuk pencitraan perusahaan di lingkungan karyawan dan program *reward* yang kompetitif terutama untuk menjaga tingkat loyalitas dan kepuasan karyawan baik dari segi gaji, tunjangan, bobot dan tantangan pekerjaan, penghargaan dan manfaat lainnya.
- Qualified Human Resources Risk
The Company manages this risk by implementing work program of sustainable development of human resources, among others, through the program of selective acceptance of new employees, the implementation of SOP (*Standard Operational Procedure*), employee motivation program including corporate branding within the work environment of employees, and a competitive reward program especially to maintain loyalty level and employee satisfaction in terms of salary, allowance, work quality and challenges, awards and other benefits.
- Risiko Perekonomian
Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan melakukan peninjauan kembali atas harga sewa (baik menaikkan maupun menurunkan), jika terjadi gejolak ekonomi atau tingkat suku bunga yang signifikan. Perseroan berkeyakinan jika terjadi kenaikan inflasi/tingkat suku bunga yang tinggi hal tersebut juga akan menyebabkan harga kendaraan bekas akan meningkat juga, dimana Perseroan tidak mendapatkan kerugian ataupun mengurangi keuntungannya akibat hal-hal tersebut.
- Economy Risk
The Company manages this risk by reviewing rental price (either raising or lowering the price), in case of economic turmoil or a significant level of interest rates. The Company believes that if there is an increase in inflation/ high interest rates, it would be followed by the increase of the price of used vehicles, in which the Company would not experience loss or it would not reduce the profit due to that matter.
- Risiko Perubahan Perilaku Konsumen
Risiko ini dikelola oleh Perseroan dengan penerapan strategi pemasaran yang efektif dan pembinaan jaringan operasional ASSA di seluruh Indonesia.
- Consumer Behavior Shifting Risk
The Company manages this risk by implementing an effective marketing strategy and by fostering ASSA operations network throughout Indonesia.
- Risiko Perubahan Metode Penjualan
Perseroan berkeyakinan dengan mayoritas konsumen korporasi yang dimiliki dan hubungan baik yang selama ini dibina dengan metode penjualan yang dilakukan secara langsung ke *customer*, tanpa melalui jalur distribusi.
- Sales Method Shifting Risk
The Company believes in the majority of customers that the Company has and with a good communication that has been maintained this whole time by using method of direct sales to the customers, without going through distribution channels.
- Risiko Perubahan Harga
Risiko ini dikelola oleh Perseroan melalui penerapan strategi pemasaran yang efektif dan pembinaan jaringan operasional ASSA di seluruh Indonesia.
- Price Changes Risk
The Company manages this risk through the implementation of an effective marketing strategy and by fostering ASSA operations network throughout Indonesia.
- Risiko Pengaruh Produk Baru atau Penarikan Produk
Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan pembinaan jaringan operasional ASSA di seluruh Indonesia.
- New Product or Product Suspension Impact Risk
The Company implements an effective marketing strategy and fostering ASSA operations network throughout Indonesia.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Evaluasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (*risk maturity level*) Perseroan, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Auditor Internal. Pelaksanaan evaluasi Manajemen Risiko di ASSA dilaksanakan dengan mengevaluasi kecukupan rancangan dan kondisi penerapan manajemen risiko perusahaan yang dapat dilakukan oleh internal auditor atau evaluator independen yang ditugaskan oleh manajemen atau Pemegang Saham Perusahaan.

Pelaksanaan evaluasi efektivitas manajemen risiko ASSA tahun 2016 mengindikasikan bahwa profil risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan berada dalam level terkendali dan sistem manajemen risiko ASSA berada dalam tingkat efisien.

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Direksi dan Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, tidak ada catatan mengenai perkara penting yang dihadapi oleh Direksi dan Dewan Komisaris ASSA.

Perkara Penting dan Permasalahan Hukum

Selama tahun 2016, tidak ada catatan mengenai perkara penting dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Direksi, Dewan Komisaris ataupun Perusahaan.

Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Benturan kepentingan dalam suatu transaksi yaitu perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan (emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik) dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perusahaan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.

Evaluation of Risk Management Effectiveness

Evaluation of risk management implementation in the Company is aimed to assess adequacy of risk management process implementation scheme and effectiveness, risk maturity level of the Company and as a reference to determine audit planning and approach which will be applied by Internal Auditor. The risk management evaluation implementation in ASSA is carried by evaluating adequacy of risk management process implementation which can be executed by internal auditor or independent evaluator assigned by the management or shareholders.

The risk management effectiveness evaluation of ASSA in 2016 indicated that key risk profile faced by the Company was in acceptable level and risk management system of ASSA was at efficient level.

Litigation Faced by Board of Directors and Board of Commissioners

During 2016, there was no record regarding litigation faced by the Board of Directors and Board of Commissioners of ASSA

Litigation and Legal Cases

In 2016, there was no record regarding litigation and legal cases faced by the Board of Directors and Board of Commissioners or the Company

Conflict of Interest and Transactions with Related Parties

Conflict of interest in a transaction is the difference between the economic interests of the Company (issuers offering of Equity Securities or public company) with the personal economic interests of directors, commissioners, and/or major shareholder of the company in a transaction that could hurt the company because their pricing that is not fair.

Jika suatu transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notaris.

Benturan *Security Dealing Rules*

Untuk melindungi individu dan Perusahaan dari setiap potensi pelanggaran atas ketentuan ini dan juga dari dugaan/klaim tuntutan pelanggaran, *Securities Dealing Rules (Dealing Rules)* ini telah diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan. Dealing Rules ini didasarkan pada Undang-undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam, namun dengan ruang lingkup lebih luas dan memberikan pedoman lebih lengkap.

Dealing Rules berlaku bagi seluruh anggota Direksi, Pejabat dan Karyawan (masing-masing sebagaimana didefinisikan di bawah) dari Perusahaan dan Anak Perusahaan. Orang-orang tersebut di atas akan diberitahukan secara individual mengenai status mereka dan diberikan salinan *Dealing Rules*.

Akses Infomasi

Penyampaian atau pemberian informasi atas kinerja Perseroan kepada para pemangku kepentingan merupakan suatu bentuk manifestasi atas transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari komitmen ASSA untuk mendukung penerapan GCG. Oleh karena itu, sebagai Perusahaan Publik, ASSA menyediakan akses informasi dan data Perusahaan bagi seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan dan publik melalui berbagai saluran sebagai berikut:

Alamat	: Gedung Graha Kirana Lantai 6, Jalan Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta Utara 14350 - Indonesia
Email	: cs@assarent.co.id
Situs	: www.assarent.co.id

If a transaction in which a director, commissioner, major shareholder or affiliated party of directors, commissioners or major shareholders have Conflict of Interest, the transactions in question must first be approved by the Independent Shareholders or their representatives who are authorized to it in the General Meeting of Shareholders as set forth in this rule. Approval on the matter must be confirmed in the form of a notarial deed.

Conflicts of Security Dealing Rules

To protect individuals and the Company of any potential violation of this provision and also of allegations/claims of infringement suits, this Securities Dealing Rules (Dealing Rules) has been imposed on the Company and its subsidiaries. Such Dealing Rules are based on the Capital Market Law and Bapepam regulations, but with a broader scope and provide more complete guidance.

Dealing Rules apply to all members of Board of Directors, Officers and Employees (each as defined below) of the Company and its subsidiaries. The people mentioned above will be notified individually regarding their status and provided with a copy of Dealing Rules.

Information access

Information disclosure and presentation regarding performance of the Company to the stakeholders becomes a manifestation of transparency and accountability of the Company to the shareholders and stakeholders. The effort is a part of ASSA commitment to support the implementation of GCG. Therefore, as a public company, ASSA provides information and corporate data access for all shareholders, stakeholders and public through various channels as follows:

Address	: Kirana Graha Building, 6th Floor, Jalan Yos Sudarso No. 88 Sunter, North Jakarta 14350 – Indonesia
Email	: cs@assarent.co.id
Site	: www.assarent.co.id

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Telepon : +62 21 6530 8811
 Facebook : ASSA
 Twitter : @infoassa

Selain melalui akses informasi tersebut, ASSA juga melaksanakan kegiatan paparan publik. Acara Public Expose Tahunan ASSA disampaikan oleh Tim Manajemen yang terdiri dari para anggota Direksi. Dalam acara tersebut, para hadirin dapat mengadakan interaksi langsung berupa tanya jawab kepada Manajemen terkait paparan kinerja aktual ASSA.

Kode Etik

ASSA memiliki Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) yang berlaku di seluruh level organisasi Perusahaan, guna mengatur berbagai hal mengenai etika ASSA terhadap pekerja, konsumen, pesaing, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, kreditur/investor, pemerintah, masyarakat, media massa dan organisasi profesi.

Selain itu CoC juga mengatur standar perilaku pekerja kepada sesama Pekerja (Insan ASSA), standar perilaku dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan, menjaga aset Perseroan, keamanan dan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, mencatat data pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dan *entertainment*, memberi hadiah/cinderamata/gratifikasi dan *entertainment*, penyalahgunaan narkoba dan miras serta standar perilaku dalam beraktivitas politik.

Sebagai bagian dari upaya dalam mencapai visi dan misi ASSA sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

Tujuan dari Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku

- Mendorong dan mendukung pengembangan dan pengelolaan Perseroan agar lebih profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan. Sebagai acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Telephone : +62 21 6530 8811
 Facebook : ASSA
 Twitter : @infoassa

Besides information access, ASSA also holds Public Expose activity. The Annual Public Expose event is presented by Management Team which consists of members of the Board of Directors. At the event, the audience may interact directly with the Management regarding ASSA actual performance explanation.

Code of Conduct

ASSA has its own Code of Conduct (CoC) which applies at all levels of the Company's organization, with an aim to regulate matters regarding work ethics of ASSA to workers, customers, competitors, providers of goods and services, business partners, creditors/investors, government, the public, mass media and professional organizations.

In addition, CoC also regulates standards of employee work behavior to fellow employees (Insan ASSA/ASSA People), standards of conduct in maintaining the confidentiality of the data and information of the Company, the securing of Company's assets, security and safety, occupational health and environmental protection, record reporting data, avoid conflicts of interest and abuse of office, receive gifts/souvenirs/gratuities and entertainment, give gifts/souvenirs/gratuities and entertainment, drugs and alcohol abuse as well as standards of conduct in political activities.

As an effort to achieve the vision and mission of ASSA as a transport services company, the Board of Directors and the Board of Commissioners commit to implement the practice of good corporate government, based on laws and regulations.

Objectives of Code of Conduct

- Encourage and support the development and management of the Company to be more professional, transparent and efficient, and to empower the organs of the Company and enhance its independency As a reference for the Company's Board of Directors and

- dalam menjalankan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan prinsip GCG.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam melakukan pengelolaan Perseoruan secara professional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan pemangku kepentingan.
 3. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- Board of Commissioners of to manage the Company with attention to the legislation, the Company's Articles of Association and to the principles of GCG
2. As a guideline for the Board of Directors in managing the Company in a professional, transparent, and responsible manner as well as to take into accounts the interests of the Company, shareholders and stakeholders.
 3. As a guideline for the Board of Commissioners in conducting an effective supervision on the management of the Company performed by the Board of Directors.

Isi Code of Conduct

Hal-hal yang diatur dalam buku *Code of Conduct* antara lain:

1. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris
2. Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
3. Pedoman Transaksi Benturan Kepentingan

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan pada *Code of Conduct* yang merupakan dokumen kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi mengenai pedoman dan mekanisme hubungan kerja antar kedua organ, tugas pokok dan tanggung jawab.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja

Sebagai wujud komitmen dan dukungan perusahaan bagi upaya pemberantasan korupsi dan untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan dan Insan ASSA terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi, ASSA membuat ketentuan yang mengatur tentang penolakan, penerimaan, pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan atau yang biasa disebut dengan gratifikasi. Pada prinsipnya semua Insan ASSA dan/atau anggota keluarganya (keluarga inti) dilarang untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung hadiah/cinderamata & hiburan (*entertainment*) dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing ASSA.

Contents of Code of Conduct

Matters set out in the book of the Code of Conduct include:

1. Code for the Board of Directors and the Board of Commissioners
2. Code of Business Ethics and Work Ethics
3. Code of Conflict of Interest Transaction

Code for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Code for the Board of Commissioners and the Board of Directors are outlined in the Code of Conduct. It is a document of agreement between the Board of Commissioners and the Board of directors regarding guideline and working relationship mechanism between the two organs, their main duties and responsibilities.

Code of Business Ethics and Work Ethics

As a commitment and support of the Company to eradicate corruption and to enhance the compliance of the Company and ASSA People to the legislation, especially to the Law of Corruption Act, ASSA regulates provisions of rejection, acceptance, and distribution of gifts/souvenirs and entertainment or commonly known as gratuities. Basically, all of ASSA People and/or their family (nuclear family) are forbidden to accept or to ask for gifts/souvenirs & entertainment either directly or indirectly to any party who have business relationship with ASSA or to the competitors of ASSA.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Hal-hal yang termasuk dalam gratifikasi berupa uang atau setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, undangan makan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, voucher, cek perjalanan, kompensasi, hadiah yang memiliki nilai finansial tinggi, hiburan dan hal lainnya yang memberikan keuntungan pribadi terhadap diri dan keluarganya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Insan ASSA atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman tersebut, diharuskan untuk segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan atau melaporkan melalui saluran *Whistleblowing System* (WBS). Perseroan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan ASSA maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

Pedoman Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana seorang Insan ASSA yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi seluruh pekerja ASSA, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. ASSA membuat Pedoman Benturan kepentingan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang dilakukan oleh Insan ASSA.

Pedoman ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan ASSA yang berkenaan dengan Konflik Kepentingan atau *Conflict of Interest* di lingkungan ASSA, agar sesuai dengan azas *Good Corporate Governance*, sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Gratuities can be in the form of cash or cash equivalents, goods, rebate (*discount*), commissions, interest-free loans, invitation to dine, travel tickets, accommodation facilities, touring, free medical treatment, vouchers, traveler's checks, compensation, gift with high financial value, entertainment and other forms of gratuities that can give personal benefit for oneself and their family and is received at home or abroad and performed with or without electronic facilities.

ASSA People or third parties that are aware of the occurrence of any violations on the provisions contained in the guidelines are required to report the violation immediately with accordance to the regulations set out by the Company or to report through the Whistleblowing System (WBS) channel. The Company guarantees that the report submitted by ASSA People or by the third party will be kept confidential.

Code of Conflict of Interest Transaction

Conflict of interest is a situation where a member of ASSA People with powers and authorities to have or suspected to have personal interests in using their authorities so that it affects the supposed quality and performance. A situation where there occurs a conflict between the economic interests of the Company with the personal economic interests of all ASSA workers, including the Board of Commissioners and the Board of Directors. ASSA formulates the Code of Conflict of Interest as an effort to prevent conflict of interests of ASSA People.

This Code is formulated with an aim and purpose to provide directions and guidance to all ASSA People regarding to the Conflict of Interest in ASSA environment to conform to the principles of Good Corporate Governance, in order to encourage the implementation of a high business ethics and to prevent fraud and other behavior irregularities.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Tujuan dari penyusunan Pengelolaan *Whistleblowing System* adalah sebagai acuan dalam tata cara pengelolaan penanganan pengaduan/peningkapan (*Whistleblowing System*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja serta pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan, agar setiap laporan yang dikirmkan terjaga kerahasiannya dan kasus yang dilaporkan dapat diperanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

Tujuan Penerapan WBS antara lain:

- Mengatasi keterbatasan system internal kontrol, seperti adanya kolusi, pertimbangan management dan internal audit yang tidak bisa mengontrol semua proses di setiap kegiatan, waktu dan tempat;
- Memberikan jaminan kerahasiaan serta sarana pelaporan;
- Mendukung penerapan praktik GCG dan peraturan Perseroan

Kebijakan ini diberlakukan bagi seluruh *stakeholders* PT Adi Sarana Armada Tbk dan Anak Perseroan.

- Pihak yang dapat melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - Internal : semua karyawan dan pihak yang berkepentingan
 - Eksternal : pelanggan, pemasok, publik, investor dan pihak lainnya yang merasa berkepentingan

Pihak Internal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama dan NIK. Pihak Eksternal yang melakukan pelaporan harus menyebutkan nama, institusi dan nomer kontak yang dapat dihubungi.

- Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan itikad baik adalah perbuatan sebagai berikut:
 - Penyalahgunaan Wewenang (Benturan Kepentingan, Penyuapan, Gratifikasi)
 - Penyalahgunaan Asset (*Cash, Non Cash* dan Pemalsuan Pengeluaran)
 - Pemalsuan Laporan (Keuangan dan Non Keuangan/ Operasional)
- Syarat Pelaporan:
Dalam melaporkan pelanggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bukti yang memadai (dokumen/surat, rekaman, gambar, dll)

The purpose of the development of Whistleblowing Management System is to become a reference in the procedure of managing complaints handling (Whistleblowing System) for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Workers and stakeholders in relation with the Company, so that each of report that is submitted can be kept confidential and can be accounted for and can be acted upon.

The purposes of the Implementation of WBS are:

- To overcome internal control system limit such as collusion, management concern and internal audit which may fail to control every process in every activity, time and place;
- To provide a guarantee of confidentiality and reporting infrastructure;
- To implement the practice of GCG as well as corporate regulation.

This policy is applied to all stakeholders of PT Adi Sarana Armada Tbk and the Company's Subsidiaries

- Parties that can report violations are:
 - Internal : all employees and stakeholders
 - External : customers, suppliers, public, investors and other parties with interests

Internal parties who wish to submit the report have to mention their names and their employee identification numbers. External parties who wish to submit the report have to mention their names, institutions and their contact details.

- Violations that can be reported are any actions which under the whistleblower perspective are the activities of, among others:
 - Abuse of Authority (Conflict of Interest, Bribery, Gratuities)
 - Abuse of Assets (Cash, Non Cash and Budget Fraud)
 - Falsification of Report (Financial and Non Financial/ Operations)
- Reporting Requirements: In reporting violations, there are some matters that have to be taken into account:
 - Sufficient evidence (documents/letters, recordings, images, etc.)

Whistleblowing System

Whistleblowing System

- b. Informasi yang jelas mengenai pokok permasalahannya
- c. Informasi dapat disampaikan secepatnya ke Email : wbs.assa@gmail.com SMS : 0811992772
- d. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin oleh Perseroan

- 4. Sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dapat dijatuhkan diatur dalam Peraturan Perseroan atau kebijakan lain yang diatur Perseroan.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Selama tahun 2016 terdapat 1 (satu) laporan pelanggaran yang diterima dari karyawan, dan hal itu sudah ditindak lanjuti serta telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perusahaan dan proses hukum yang berlaku.

Sistem Perlindungan Pelapor

- 1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
- 2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perseroan.
- 3. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.
- 4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan.
- 5. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

- b. Clear information on the subject matter
- c. Information can be submitted immediately to Email: wbs.assa@gmail.com SMS:0811992772
- d. Confidentiality of the complainant's identity is guaranteed by the Company

- 4. In accordance with the policy of whistleblower protection, the complainants who sent a slanderous report or false statements will be sanctioned and will not get either guarantee of confidentiality or whistleblower protection. The sanctions that can be imposed are stipulated in the Company Regulations or other regulations set out by the Company.

Submission of Violations Report

During 2016, there was 1 (one) violation report received from employees, and it has been followed up and has been completed in accordance with company rules and applicable legal process.

Whistleblower Protection System

- 1. In the process of the follow-up on any complaint/disclosure, confidentiality, presumption of innocence and professionalism shall be put forward.
- 2. The confidentiality of the identity of the Whistleblower is guaranteed by the Company.
- 3. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from any forms of threats, intimidation, punishment or unpleasant act from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported case to any party.
- 4. This protection also applies to the workers who conduct investigation or for any parties who give information regarding the complaint/disclosure.
- 5. Person who violates the said principle of confidentiality will be given severe sanctions in accordance with the regulations applicable in the Company.

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Penanganan Pengaduan

1. Mekanisme Pelaporan
 - a. Pelaporan pelanggaran dapat disampaikan kepada Tim WBS melalui sarana yang disediakan. Untuk penanganan lebih lanjut Tim WBS dapat membentuk Tim Investigasi yang berisikan managemen, audit internal dan pihak lain yang dirasa perlu.
 - b. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Direksi atau orang yang mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Tim WBS dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
 - c. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, maka laporan pelanggaran disampaikan kepada Tim WBS. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
 - d. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota Tim WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Direktur. Penanganan lebih lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut akan dilakukan Direksi dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk membentuk Tim Investigasi yang independen.
 - e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Tim WBS, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada Internal Audit Perseroan atau penegak hukum yang berwenang.
 - f. Sarana untuk pelaporan dapat membuat pengaduan/ penyikapan dan mengirimkannya kepada Pengelola WBS melalui wbs.assa@gmail.com

Report handling

1. Reporting Mechanisms
 - a. Reporting of violations may be submitted to WBS Team through the facilities provided. For further handling, WBS Team can form an Investigation Team consisting of management, internal audit and other parties deemed necessary.
 - b. In the case of violations committed by Member of the Board of Directors or person who has special relationship with member of the Board of Directors, the violation report has to be submitted to WBS Team and if it requires investigation, it is advisable to establish an independent Investigation Team.
 - c. In the case of violations committed by Member of the Board of Commissioners, the violation report has to be submitted to WBS Team. Further handling will be performed by the Board of Directors and if it requires investigation, it is advisable to establish an independent Investigation Team
 - d. In the event case of violations committed by member of WBS Team, the violation report has to be submitted directly to the President Director. Further handling will be performed by the Board of Directors and if it requires investigation, it is advisable to establish an independent Investigation Team.
 - e. In the case of violations committed by Member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and WBS Team, the violation report has to be submitted to the Internal Audit of the Company or to the law enforcement authorities.
 - f. Whistleblowers can submit complaint/disclosure and send it to the Management of WBS on wbs.assa@gmail.com

